

**PENGARUH PROPORSI PAJAK DAERAH,
RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN
KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN,
DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH TERHADAP TINGKAT
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
PERIODE 2012 – 2016)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ADILAH
NIM. 145030401111053



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 April 2018

Jam : 10.00-11.00 WIB

Skripsi atas nama : Adilah

Judul : Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat
Kemandirian Keuangan Daerah. (Studi Pada Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016)

dan dinyatakan

LULUS

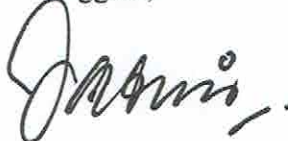
MAJELIS PENGUJI

Ketua,



Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP
NIP. 19770420 200502 2 001

Anggota,



Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota,



Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Adilah menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 17 Maret 2018



Adilah

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Adilah
 Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 07 Februari 1996
 Agama : Islam
 Jenis kelamin : Perempuan
 Status : Belum Kawin
 Alamat rumah : Jalan Anggrek No. 20,
Kab. Sumenep
 Alamat sekarang : Jalan Dewi Sartika III, Perum
Puri Indah Blok a7, Kota Batu
 Nomor telepon : 082140424556
 Motto : Jika Kamu Yakin Itu Bisa, WUJUDKAN.
 Email : Adilah7296@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Tahun	Pendidikan
2002 - 2008	SDN PANGARANGAN 1 SUMENEP
2008 - 2011	SMPN 1 SUMENEP
2011 - 2014	SMAN 1 SUMENEP
2014 - 2018	UNIVERSITAS BRAWIJAYA - S1 PERPAJAKAN

Riwayat Organisasi

Tahun	Organisasi
2014-2015	ANGGOTA SSM FIA-UB
2014-2015	ANGGOTA PEDULI LINGKUNGAN HILO GREEN COMMUNITY MALANG
2015-2016	ANGGOTA SEC FIA-UB
2015 -2016	ANGGOTA FORKIM FIA-UB

Kepanitiaan

Tahun	Kepanitiaan
2015	Staff Divisi Acara dalam Seminar Nasional "Strategi Peningkatan Daya Saing Menghadapi MEA untuk Indonesia Berdikari
2015	Staff Divisi Admin PKKMA FIA-UB
2016	Staff Divisi Humdan SabarJak FIA-UB
2016	Staff Divisi Kestari Tax Planning Competition 2016

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP, selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Rekan-rekan angkatan perpajakan 2014 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Terimah kasih untuk doa, kasih sayang serta cinta yang selama ini mama, papa, mas aswan, dan mas arif berikan kepada ila yang senantiasa mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan dukungan baik dukungan moril serta materi kepada ila. Keluarga kedua peneliti Bu Asfika, Uyin, MbK Debok, Abang Ayek, Lek Sani, De Dar, Widya yang selalu mendoakan kelancaran, memberikan semangat, dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini serta tak luput pula teman-teman yang sangat ila sayangi dan banggakan Cimbo yaitu Ani, Dewi, Emilda, Jastika, Sifa, Rahmah dan Geng Buje yaitu MbK didi, Rani, Becky, Amoy, Fira, Ira, Alisya, Aiqa yang terus memberikan support dan menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi, dan sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini. Kalian sungguh teman yang sangat berjasa dan anugerah terindah dari Allah SWT yang pernah dan selalu ila miliki.

Malang, 15 Mei 2018

Peneliti

RINGKASAN

Adilah, 2018, **Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016)**. Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP. 195 Halaman, + xvii

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Sampel yang digunakan sebanyak 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 dengan menggunakan sampel jenuh. Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda, statistik deskriptif dan statistik inferensial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 88,2% perubahan atau variasi dalam tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016 dapat dijelaskan oleh variabel proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian sisanya sebesar 11,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

SUMMARY

Adilah, 2018, *The Influence Of The Proportion Of Local Tax, Local Retribution, The Result Of Separated Regional Wealth Managemenet, And Other Legitimate Local Revenue To The Level Of Local Financial Independence. (Case Study in the Districts/Cities In East Java Province Period 2012-2016)*. Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP. 195 Pages, + xvii

The purpose of this research is to determine the influence of the proportion of local tax, local retribution, the result of separated regional wealth managemenet, and other legitimate local revenue to the local financial independence in the districts/cities in East Java province period 2012-2016.

This research type is explanatory research with quantitative approach.. The data using a secondary data obtained through the data from the central bureau of statistics and the directorate general of treasury finance ministry of finance. Population in this study is all districts/cities in East Java province period 2012-2016. Samples used as much as 38 districts/cities every year from 2012 to 2016 using a saturated sample. The methods of data analysis using multiple linier regression, descriptive statistics, and inferential statistics.

The Results from this study showed that in partial of variable the proportion of the local tax, local retribution, the reseult of separated regional wealth management, and other legitimate local revenue significant influence to the Local Financial Independence. The results of determination coefficient test showed that 88,2% change or variation in the level of regional financial independence in districts/cities in East Java province period 2012-2016 can be explained by the variable proportion of the local tax, local retribution, the reseult of separated regional wealth management, and other legitimate local revenue. Then the rest of 11,8% is explained by other variables not included in this study.

Keywords: *The Proportion Of Local Tax, Local Retribution, The Result Of Separated Regional Wealth Managemenet, Other Legitimate Local Revenue, The Level Of Local Financial Independence.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan anugerahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Ibu Sri Sulasmiyati, S.Sos., MAP, selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama di bangku perkuliahan.
7. Kedua orangtua dan kakak peneliti yang telah senantiasa mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan dukungan baik dukungan moril serta materi kepada peneliti.
8. Keluarga kedua peneliti Bu Asfika, Uyin, Mbik Debok, Abang Ayek, Lek Sani, De Dar, Widya yang selalu mendoakan kelancaran, memberikan semangat, dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Cimbo yaitu Ani, Dewi, Emilda, Jastika, Sifa, Rahmah dan Geng Buje yaitu Mbik didi, Rani, Becky, Amoy, Fira, Ira, Alisya, Aiqan yang terus mensupport dan menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi, dan sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman – teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini.

Malang, 17 Maret 201

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAM JUDUL	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO... ..	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Otonomi Daerah	21
1. Pengertian Otonomi Daerah	21
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	22
3. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	23
C. Keuangan Daerah	24
1. Pengertian Keuangan Daerah	24
2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	24
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	26
1. Pengertian APBD	26
2. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD	26
3. Struktur APBD	27
E. Tinjauan Umum Perpajakan.....	28
1. Pengertian Pajak	28
2. Pengklasifikasian Pajak.....	29
F. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah.....	30
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30
a. Pajak Daerah.....	31
b. Retribusi Daerah.....	34
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.....	38

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	38
2. Dana Perimbangan	39
a. Dana Bagi Hasil (DBH)	39
b. Dana Alokasi Umum (DAU)	40
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	40
3. Pinjaman Daerah	41
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	42
G. Kemandirian Keuangan Daerah	42
1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah	42
2. Tujuan Kemandirian Keuangan Daerah	43
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	43
H. Hubungan Antar Variabel	45
1. Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016	45
2. Pengaruh Proporsi Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016	46
3. Pengaruh Proporsi Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016	47
4. Pengaruh Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016	48
5. Pengaruh Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016	49
I. Model Konsep dan Model Hipotesis	50
1. Model Konsep	50
2. Model Hipotesis	50

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian	54
C. Pengertian dan Pengukuran Variabel	54
1. Pengertian Variabel	54
2. Pengukuran Variabel	58
D. Populasi dan Sampel Penelitian	59
1. Populasi Penelitian	59
2. Sampel Penelitian	60
E. Teknik Pengumpulan Data	61
1. Dokumentasi	61

2. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	62
F. Jenis dan Sumber Data	62
1. Jenis Data	62
2. Sumber Data	63
G. Metode Analisis Data	64
1. Analisis Statistik Deskriptif	65
2. Analisis Statistik Inferensial	65
a. Uji Asumsi Klasik	65
1) Uji Normalitas	66
2) Uji Heteroskedastisitas	68
3) Uji Multikolinearitas	70
4) Uji Autokorelasi	70
3. Analisis Regresi Linier Berganda	71
4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	72
5. Pengujian Hipotesis	73
a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	73
b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Gambaran Umum Objek	75
1. Kondisi Geografis	75
2. Kondisi Demografis	77
3. Kondisi Ekonomi	79
B. Penyajian Data	81
1. Variabel Bebas (X)	81
2. Variabel Terikat (Y)	91
C. Analisis Data	94
1. Hasil Uji Normalitas Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	95
2. Prosedur Data <i>Outlier</i>	95
3. Transformasi Data Pada Sampel Penelitian	110
4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif	116
4. Hasil Analisis Statistik Inferensial	118
a. Hasil Pengujian Asumsi Klasik	118
1) Uji Normalitas	118
2) Uji Heteroskedastisitas	122
3) Uji Multikolinieritas	123
4) Uji Autokorelasi	124
5. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda	125
6. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	128
7. Hasil Pengujian Hipotesis	130
a. Hasil Uji Simultan (Uji F)	130
b. Hasil Uji Parsial (Uji t)	131
D. Pembahasan	134

BAB V	PENUTUP	145
	A. Kesimpulan	145
	B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA		149
LAMPIRAN.....		152



DAFTAR TABEL

No. Judul	Halaman
1. Tabel 1 Penelitian Terdahulu	17
2. Tabel 2 Kemandirian Keuangan Daerah	44
3. Tabel 3 Pengukuran Variabel.....	58
4. Tabel 4 Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	60
5. Tabel 5 Pengambilan Keputusan.....	71
6. Tabel 6 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016	77
7. Tabel 7 Proporsi Pajak Daerah Tahun 2012-2016	81
8. Tabel 8 Proporsi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016	83
9. Tabel 9 Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012-2016	86
10. Tabel 10 Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2012-2016	89
11. Tabel 11 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2012-2016	91
12. Tabel 12 Pemindaian Data Outlier Pada Proporsi Pajak Daerah Tahun 2012-2016	96
13. Tabel 13 Pemindaian Data Outlier Pada Proporsi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016	98
14. Tabel 14 Pemindaian Data Outlier Pada Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012-2016.....	101
15. Tabel 15 Pemindaian Data Outlier Pada Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2012-2016	104
16. Tabel 16 Pemindaian Data Outlier Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2012-2016.....	106
17. Tabel 17 Data Outlier Pada Sampel Penelitian	108
18. Tabel 18 Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Pajak Daerah.....	111
19. Tabel 19 Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Retribusi Daerah	112
20. Tabel 20 Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	113
21. Tabel 21 Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	114
22. Tabel 22 Hasil Logaritma Natural Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	115
23. Tabel 23 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	117
24. Tabel 24 Hasil Statistik Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)	121
25. Tabel 25 Hasil Uji Multikolinieritas	123
26. Tabel 26 Hasil Uji Durbin-Watson	124
27. Tabel 27 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	125
28. Tabel 28 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	129
29. Tabel 29 Hasil Uji Simultan (Uji F)	130
30. Tabel 30 Hasil Uji Parsial (Uji t)	131
31. Tabel 31 Keputusan Hipotesis	134

DAFTAR GAMBAR

No. Judul	Halaman
1. Gambar 1 Model Konsep	50
2. Gambar 2 Model Hipotesis	51
3. Gambar 3 Peta Jawa Timur	76
4. Gambar 4 Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Tahun 2015	80
5. Gambar 5 Normal Probability Plot Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	95
6. Gambar 6 Hasil Uji <i>Box Plot</i> Proporsi Pajak Daerah (X_1)	96
7. Gambar 7 Hasil Uji <i>Box Plot</i> Proporsi Retribusi Daerah (X_2).....	98
8. Gambar 8 Hasil Uji <i>Box Plot</i> Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3)	101
9. Gambar 9 Hasil Uji <i>Box Plot</i> Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X_4).....	103
10. Gambar 10 Hasil Uji <i>Box Plot</i> Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	106
11. Gambar 11 Grafik Histogram Pada 27 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.....	110
12. Gambar 11 Grafik Histogram	119
13. Gambar 12 Normal Probability Plot	120
14. Gambar 13 Grafik <i>Scatterplot</i>	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era reformasi Indonesia telah melakukan beberapa perubahan yang dilaksanakan dalam upaya pengembangan sistem tata kelola pemerintahan. Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia ini dapat dikatakan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu perkembangan sistem tata kelola pemerintah adalah perubahan mengenai tata kelola keuangan daerah. Hal tersebut dimulai sejak 1 Januari 2001 yang ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Menurut Mahmudi (2010:2), perkembangan mengenai tata kelola keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, masa pra-otonomi daerah pada tahun 1974 sampai dengan tahun 1999. Masa pra-otonomi daerah ini berada pada masa orde baru. Pemerintah Indonesia pada masa orde baru menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan Di Daerah yang bersifat sentralistik. Pada masa orde baru ini sistem penyelenggaraan pemerintah sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan di Indonesia lebih didominasi oleh pemerintah pusat sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, daerah–daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah.

Kedua, masa transisi otonomi daerah pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003. Pada masa transisi otonomi daerah ini ditandai dengan sudah diterapkannya

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan mengenai peraturan yang terkait otonomi daerah tersebut serta kelembangaan dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Pada masa transisi ini masih sering diberlakukan uji coba sistem sehingga berakibat seringkali terjadi revisi peraturan yang mengatur mengenai tata kelola keuangan khususnya otonomi daerah. Oleh karena itu pada masa transisi ini dapat dikatakan bahwa otonomi daerah ini belum dilaksanakan sepenuhnya tetapi peraturan mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah dibentuk meskipun memiliki banyak kekurangan.

Ketiga, masa pascatransisi otonomi daerah pada tahun 2004 hingga sekarang. Pada masa pra-otonomi daerah adalah masa dimana peraturan mengenai otonomi daerah telah diberlakukan dan diimplementasikan. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dimana undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

Otonomi daerah menjadi dasar bahwa daerah berhak menetapkan segala kebijakan tentang daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah. Namun, dalam menetapkan suatu kebijakan daerah, pemerintah tetap harus berpedoman pada norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satunya dalam hal membuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber–sumber pendapatan daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memberikan sebuah persepsi baru terhadap perkembangan sistem tata kelola keuangan untuk pemerintah daerah bahwa otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya alam serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar daerah dapat mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya sehingga dapat memberikan andil dan bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah membutuhkan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah dalam hal menggali dan mengelola sumber–sumber pendapatan daerah yang disamping itu pula didukung dengan adanya penerimaan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber–sumber pendapatan daerah yang terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) baik yang berasal dari pajak maupun Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana

Alokasi Khusus (DAK), (3) pinjaman daerah, dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Apabila dilihat dari penjelasan mengenai wewenang daerah dalam bidang keuangan, hal ini penting untuk dikaji secara teoritis dikarenakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola serta membiayai sendiri pengeluaran rutin maupun pembangunannya merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kualitas otonomi daerah. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan utama yang berasal dari daerah tersebut sendiri maka semakin baik pula kontribusi pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Begitu juga sebaliknya, semakin besar bantuan atau subsidi pemerintah pusat terhadap daerah maka semakin buruk pelaksanaan otonomi suatu daerah atau dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai tingkat ketergantungan yang besar terhadap keuangan pemerintah pusat. Selain itu, satu hal yang juga berperan penting dalam hal keuangan daerah selain upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) adalah upaya bagaimana pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah juga dianggap penting karena akan menentukan bagaimana kinerja suatu pemerintahan daerah. Selanjutnya kegiatan pengelolaan keuangan daerah tersebut akan dituangkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Kemudian dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka pemerintah daerah berarti telah memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik pula. Kemampuan daerah yang

dimaksud dalam hal ini adalah tingkat dimana suatu daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah tidak memiliki ketergantungan atau memiliki kemandirian keuangan daerahnya sendiri terhadap pemerintah pusat. Menurut Mahmudi (2010:142) Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah yang baik menurut Halim (2007:262) dapat dilihat dari dua hal, yaitu dari segi kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber pendapatan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan dari segi bagaimana ketergantungan daerah terhadap bantuan yang berasal dari pemerintah pusat.

Selanjutnya mengenai lokasi penelitian, peneliti memilih Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini dikarenakan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang dapat dikatakan berkembang dalam segi perekonomiannya. Berdasarkan data yang terdapat di Badan Pusat Statistik Jawa Timur melalui website www.bps-jatim.go.id, Provinsi Jawa Timur memiliki industri pengolahan terbesar dan terbanyak kedua di Indonesia, yakni pada tahun 2016 terdapat 637.269 unit industri pengolahan di Jawa Timur. Hal ini bisa dibuktikan dengan terdapat industri besar yang ada di Jawa Timur, seperti PT Penataran Angkatan Laut (PAL) di Surabaya yang merupakan galangan pembuatan kapal, PT Pindad di Malang merupakan industri perlengkapan tempur, PT Tjiwi Kimia yang merupakan pabrik kertas di Sidoarjo, PT Petrokimia

Gresik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan didapatkan pasti bervariasi di setiap kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur sehingga akan menyebabkan perbedaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan pada dasarnya melalui kemandirian dalam hal keuangan daerah tersebut akan memberikan bukti yang signifikan mengenai tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menimbulkan gagasan peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“PENGARUH PROPORSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2012-2016)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?
2. Apakah proporsi pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?
3. Apakah proporsi retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?
4. Apakah proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?
5. Apakah proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa timur periode 2012-2016.

2. Untuk menguji apakah proporsi pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.
3. Untuk menguji apakah proporsi retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.
4. Untuk menguji apakah proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.
5. Untuk menguji apakah proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

D. Kontribusi Penelitian

Data dan Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

periode 2012-2016” diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat memberikan sumber referensi bagi semua pihak terkait maupun bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sejenis dengan penelitian ini. Khususnya mengenai pengaruh proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diterima di bangku kuliah dengan melakukan penelitian tentang “Pengaruh proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016”.

- b. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa timur

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa timur, yaitu berupa masukan informasi dalam bentuk bukti empiris mengenai pengaruh proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini terdiri dari lima Bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, teori-teori yang mendasari penelitian, serta model konsep dan hipotesis yang menjelaskan tentang alur dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas dan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi variabel dan pengukuran variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, hasil pengujian asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas dan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan dalam rangka menunjang analisis dan landasan teori yang terdapat pada penelitian ini. Penelitian terdahulu memiliki kegunaan sebagai sumber referensi dan sebagai bahan untuk mengetahui tingkat perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti, yaitu terdapat lima penelitian terdahulu yang dianggap memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan, Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur periode 2012-2016)” adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) dengan judul penelitian adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Penelitian oleh Tahar dan Zakhiya ini bertujuan untuk memverifikasi, pertama apakah pendapatan asli daerah berdampak positif terhadap kemandirian daerah dan apakah dana alokasi umum tersebut berdampak negatif terhadap kemandirian daerah. Kedua, apakah dana alokasi pemerintah daerah dan dana alokasi umum yang didukung oleh daerah akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pertumbuhan

ekonomi. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode *purposive sampling* dengan total sampel 36 (tiga puluh enam) kabupaten/kota setiap tahun dari 56 (lima puluh enam) kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2003 sampai dengan 2008. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Departemen Keuangan. Data yang dianalisis disusun dari APBD dan data tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, dana alokasi pemerintah daerah dan dana alokasi umum yang didukung oleh daerah tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afarahim (2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010”. Penelitian oleh Afarahim ini bertujuan untuk menghitung pertumbuhan rasio keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan model *eksplanatif* dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2005-2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kontribusi sangat rendah, tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kontribusi sangat rendah, dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Megariski (2016) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2010-2014). Penelitian oleh Megariski bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur. Sampel penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menggunakan *fixed effect* yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan

negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016 (Studi Empiris Pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016). Penelitian oleh Novalistia bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan uji regresi, dengan uji asumsi klasik sebelum mencapai model studi terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dana bagi hasil pajak sebagai variabel bebas dan kemandirian keuangan daerah (otonomi daerah) sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan bagi hasil pajak secara signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak signifikan dalam mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, Sabijono, dan Tirayoh (2016) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo”. Penelitian oleh Nggilu, Sabijono, dan Tirayoh bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) kabupaten/kota setiap tahunnya dari tahun 2009-2016. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier regresi berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikan 0,000 dan untuk variabel retribusi daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Selanjutnya secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah dimana variabel pajak daerah dan retribusi daerah hanya mempunyai kontribusi sebesar 76% (tujuh puluh enam persen) terhadap variabel kemandirian keuangan daerah sedangkan sisanya sebesar 34% (tiga puluh empat persen) disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh peneliti yang digambarkan dalam tabel 1 penelitian terdahulu agar lebih mudah dalam memahami, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Tahar dan Zakhiya (2011), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara, dana alokasi pemerintah daerah dan dana alokasi umum yang didukung oleh daerah tidak memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	a. Variabel terikat yang digunakan adalah kemandirian daerah. b. Sumber data didapatkan melalui website DJPK dan BPS.	a. Variabel terikat lain yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. b. Variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). b. Lokasi penelitian kabupaten/kota di Pulau Kalimantan. c. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2003-2006.

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Afarahim (2013), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2005-2010.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir yang memiliki kontribusi sangat rendah, dan tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan daerah Indragiri Hilir.	a. Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. b. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah. c. Sumber data didapatkan melalui website DJPK dan BPS.	a. Variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan. b. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model eksplanatif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. c. Lokasi penelitian di Kabupaten Indragiri Hilir. d. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2005-2010.
3.	Megariski (2016) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),	Hasil penelitian menggunakan <i>fixed effect</i> yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh signifikan positif	a. Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. b. Lokasi penelitian di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.	a. Variabel bebas yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal. b. Data yang digunakan

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah (studi kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2010-2014).	terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.	c.Sampel penelitian yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. d.Sumber data didapatkan melalui website DJPK dan BPS.	berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2010-2014.
4.	Novalistia (2016), Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan kabupaten/kota	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah dan bagi hasil pajak secara signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sedangkan retribusi daerah tidak signifikan dalam mempengaruhi kemandirian keuangan.	a.Variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. b.3 (tiga) variabel bebas yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. c.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian.	a.Variabel bebas yang digunakan adalah bagi hasil pajak. b.Lokasi penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. c.Sampel penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	di Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2016. Nggilu, Sabijono, dan Tirayoh (2016), Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Gorontalo.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikan 0,000 dan untuk variabel retribusi daerah juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai signifikansi 0,006. Kemudian secara simultan variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap	kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. d. Sumber data didapatkan melalui website DJPK dan BPS. a. Variabel terikat yang digunakan adalah kemandirian keuangan daerah. b. Variabel bebas yang digunakan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. c. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. c. Sumber data didapatkan melalui website DJPK dan BPS.	a. Lokasi penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. b. Sampel penelitian, yaitu 6 (enam) kabupaten/kota yang berada di Provinsi Gorontalo.

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
		kemandirian keuangan daerah.		

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *auto* dan *nomos*. *Auto* berarti sendiri sedangkan *nomos* berarti perintah. Oleh karena itu otonomi dapat diartikan sebagai memerintah sendiri (Tangkilisan, 2007:32). Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang. Jadi, secara umum otonomi daerah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut menurut Bratakusumah dalam Hanafi dan Nugroho (2009:8):

- Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar.
- Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya.
- Daerah memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri.
- Lembaga daerah memiliki kekuasaan terhadap eksekutif daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dengan

sebaik-baiknya seperti yang dijelaskan oleh Kaho dalam Hanafi dan Nugroho (2009:8-9), yaitu:

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaannya harus baik.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dan baik akan berjalan lancar apabila Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaannya baik. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak sebagai penggerak roda organisasi pemerintahan.
- b. Keuangan harus cukup dan baik.
Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup atau tidaknya kemampuan dalam bidang keuangan karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.
- c. Peralatan harus cukup dan baik.
Pengertian peralatan yang dimaksud adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah.
- d. Organisasi dan manajemennya harus baik.
Organisasi yang dimaksud adalah struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat kekuasaan, tugasnya, dan hubungan satu sama lain sedangkan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah secara umum adalah semua hal atau sasaran yang ingin dicapai oleh seseorang atau suatu badan tertentu sesuai dengan apa yang direncanakan pada awal mulanya. Tujuan Otonomi daerah sendiri menurut Maskun dalam Hanafi dan Nugroho (2009:11) adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ekonomi masyarakat setempat.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan sosial budaya masyarakat.
- d. Untuk demokratisasi, yaitu berarti dengan adanya otonomi daerah, suatu pemerintahan daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahannya.

Selanjutnya tujuan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dalam Hanafi dan Nugroho (2009:11-12) dapat dibedakan menjadi dua sisi kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Apabila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat, tujuan utama adanya otonomi daerah adalah pendidikan, politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah. Apabila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah terdapat tiga tujuan menurut Halim dalam Hanafi dan Nugroho (2009:12), yaitu:

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality* artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik baik ditingkat lokal maupun di daerah.
- b. Untuk menciptakan *local accountability* artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan *local responsiveness* artinya dengan adanya otonomi daerah akan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi.

3. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Menurut Kuncoro dalam Hanafi dan Nugroho (2009:54), Prinsip-prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dianut adalah sebagai berikut:

- a. Otonomi yang nyata artinya otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah.
- b. Otonomi yang bertanggung jawab artinya pemberian otonomi dijadikan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan seluruh pelosok tanah air.
- c. Dinamis yaitu pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih maju dan baik.

C. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Mamahes dalam Halim (2010:23) adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, dan barang yang dapat dijadikan kekayaan milik daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut maka secara prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur-unsur yang dapat dinilai dengan uang atau berupa uang menurut Mamahes dalam Halim (2007:23) sebagai berikut:

- a. Hak daerah adalah hak suatu daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, hak mendapatkan dana perimbangan, dan hak daerah untuk mengadakan atau melakukan pembiayaan dalam rangka untuk pembiayaan daerah.
- b. Kewajiban daerah, yaitu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, melaksanakan otonomi daerah, serta menyelenggarakan urusan pemerintah yang seluruh dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- c. Kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010:10) menjelaskan bahwa prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

- a. Akuntabilitas
Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang telah diterima oleh pemerintah daerah sehingga perumusan kebijakan bersama-sama dengan cara dan hasil

kebijakan harus dapat diakses dan dikomunikasikan baik secara vertikal maupun secara horizontal dengan baik.

b. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Keadaan tersebut hanya akan dicapai apabila lembaga dan sektor publik dapat mengelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Berdasarkan Konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah untuk mencapai *good governance*. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money* maka diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

c. Kejujuran

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk melakukan korupsi dapat diminimalisir.

d. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui serta diawasi baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat daerah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya dapat menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat daerahnya.

e. Pengendalian

Penerimaan dan pengeluaran daerah dalam hal ini yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dimonitor atau diawasi agar dapat mengetahui perbandingan target serta realisasi anggarannya sehingga dapat mengetahui dan mencari bagaimana upaya pemerintah daerah agar target keuangan tersebut dapat terealisasi dengan tepat dan baik.

Dari keseluruhan prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut akan saling terdapat keterkaitan antara satu sama lain, sehingga untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik pemerintah daerah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada.

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara yudisial, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu :

a. Menurut Suhadak dan Nugroho (2007:133) menjelaskan bahwa:

“ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja yang dituangkan dalam rencana keuangan dimana di satu pihak berisikan kebijakan dan program kerja pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran sedangkan di pihak lain berisi rencana penerimaan yang diharapkan dapat menutup pengeluaran tersebut dan disusun untuk masa tertentu”.

b. Menurut Badrudin (2012:97) menjelaskan bahwa:

“ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah”.

2. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan penjelasan dari pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menurut Suhadak dan Nugroho (2007:134) proses

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memperhatikan prinsip penyusunan anggaran sebagai berikut:

- a. Keseimbangan, yaitu adanya asumsi yang rasional terjadi keseimbangan antara rencana penerimaan dan pengeluaran.
- b. Komprehensif, yaitu seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan yang mempunyai akibat keuangan harus dicantumkan dalam anggaran.
- c. Kemandirian, yaitu adanya usaha-usaha dari daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan.
- d. Terperinci, yaitu secara detail memuat rincian mengenai penerimaan maupun pengeluaran melalui kode setiap mata anggaran.
- e. Disiplin, yaitu bahwa rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sudah diajukan sesuai jadwal waktu yang sudah ditentukan sehingga perlu diperhatikan saat penyusunan dan pengesahannya.
- f. Fleksibel, yaitu karena disadari bahwa anggaran pada dasarnya masih merupakan rencana maka dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan.
- g. Prioritas, yaitu penyusunan anggaran diupayakan dapat mempertajam keutamaan penggunaan dana yang tersedia untuk pembiayaan program dan kegiatan.
- h. Keterbukaan, yaitu apabila Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) telah disetujui untuk dilaksanakan maka anggaran tersebut harus dipublikasikan untuk diketahui semua pihak.

3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Djaenuri (2014:151) menjelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Satu kesatuan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Belanja Daerah
Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Belanja menurut organisasi adalah satu kesatuan pengguna anggaran seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Kemudian untuk belanja menurut fungsinya misalnya untuk pendidikan, kesehatan, perbaikan sarana dan prasarana, dan fungsi-fungsi lainnya sedangkan untuk belanja menurut jenisnya maksudnya adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal atau pembangunan.
- c. Pembiayaan
Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaannya. Sumber-sumber pembiayaan tersebut merupakan sumber yang berasal dari penerimaan daerah, antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran, yaitu seperti pembayaran utang pokok.

E. Tinjauan Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

- a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro dalam Priantara (2013:2)
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”.
- b. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Priantara (2013:2)
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Pengertian pajak menurut para ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni kewajiban masyarakat untuk menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi atau ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

2. Pengklasifikasian Pajak

Menurut Priantara (2013:6-7) pajak dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga institusi pemungutannya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib pajak (WP) yang berkewajiban membayar pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung ini dapat diartikan bahwa pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini dipungut oleh Wajib Pajak (WP) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh wajib Pajak (WP) tersebut.

b. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya.

Contoh: Wajib Pajak (WP) adalah Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutannya pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak negara atau pajak pusat ini dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai secara umum pelaksanaan pemerintah dan pembangunan negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Pajak daerah digunakan sebaiknya-baiknya untuk membiayai sehubungan dengan pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah tersebut.

Contoh: Pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain sebagainya.

F. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Dalam pasal 285 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) mendefinisikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan

daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dibedakan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah sebagai pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum daerah yakni pelaksanaan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah yang lebih baik. Pengertian pajak daerah menurut beberapa sumber dan para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b) Menurut Priantara (2013:535) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi (OP) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c) Menurut Siahaan (2016:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada Orang Pribadi (OP) atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik itu di tingkat pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Berkenaan mengenai proses administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Kantor Pajak Daerah (KPD) atau kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat. Karakter pajak daerah menurut Zuraida (2012:31) adalah sebagai berikut:

- a) Dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
- c) Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila Wajib Pajak (WP) tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d) Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e) Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f) Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Peraturan perundang-undangan ini menjelaskan mengenai pengertian, subjek, objek, tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah secara umum. pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan

peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan kebijakan daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dengan syarat pemerintah daerah tidak boleh atau dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya mengenai tarif yang ditetapkan dapat pula disesuaikan dengan pertimbangan penghasilan rata-rata masyarakat daerah setempat atau tidak menjadi beban bagi masyarakat daerah tersebut dengan batasan tidak melebihi tarif maksimal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijabarkan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua jenis meliputi:

- a) Pajak Provinsi yang terdiri atas lima jenis pajak, yaitu:
 - Pajak Kendaraan Bermotor
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - Pajak Air Permukaan
 - Pajak Rokok.
- b) Pajak Kabupaten/kota yang terdiri atas 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu:
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Bumi dan Bangunan

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

4) Perhitungan Pajak Daerah

Besaran pokok pajak yang terutang dari setiap pajak daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak tersebut dengan dasar pengenaan pajaknya. Menurut Siahaan (2016:91) cara perhitungan pajak daerah ini digunakan dalam setiap jenis pajak daerah yang juga digunakan dan merupakan perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

b. Retribusi Daerah

1) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pelaksanaan Pemerintah daerah maupun pembangunan daerah. Adapun pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang dan para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi (OP) atau badan.

- b) Menurut Mardiasmo (2011:100) retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
- c) Menurut Siahaan (2016:6) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi (OP) atau badan.

2) Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi daerah adalah berbagai atau seluruh jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dikatakan atau dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa retribusi tertentu yang menurut pertimbangan atau aspek sosial dan ekonomi yang layak untuk dijadikan sebagai suatu objek retribusi. Menurut Siahaan (2016:620) jasa tertentu tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa Umum.

Retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan atau dipungut berkaitan dengan jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi (OP) atau badan tersebut. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan
- Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Retribusi Pelayanan Pasar
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- Retribusi Pelayanan Pendidikan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b) Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang dikenakan atau dipungut dalam hal pelayanan yang disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yaitu prinsip yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan (*profit*). Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Retribusi Tempat Pelelangan
- Retribusi Terminal
- Retribusi Tempat Khusus Parkir
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- Retribusi Rumah Potong Hewan
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- Retribusi Penyeberangan di Air
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c) Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang dikenakan atau dipungut atas pelayanan perizinan atau pemberian izin

tertentu oleh pemerintah daerah kepada Orang Pribadi (OP) atau badan yang dimaksudkan dalam rangka pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam (SDA), barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum dari segala aktivitas yang dilakukan dan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu sebagai berikut:

- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- Retribusi Izin Gangguan
- Retribusi Izin Trayek
- Retribusi Izin Usaha Perikanan

3) Subjek Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2016:628) subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a) Subjek retribusi jasa umum adalah Orang Pribadi (OP) atau badan yang telah menggunakan atau menikmati atas pelayanan jasa umum yang bersangkutan dari pemerintah daerah.
- b) Subjek retribusi jasa khusus adalah Orang Pribadi (OP) atau badan yang telah menikmati atau menggunakan pelayanan jasa usaha yang bersangkutan dari pemerintah daerah.
- c) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah Orang Pribadi (OP) atau badan yang telah menerima atau memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu.

4) Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh Orang Pribadi (OP) atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini (Siahaan, 2016:642).

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Tingkat penggunaan jasa}$$

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Djaenuri (2014:99) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil keuntungan bersih perusahaan milik daerah dan badan-badan usaha milik daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersifat:

- 1) Memberi jasa
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum
- 3) Menghasilkan pendapatan atau laba
- 4) Mengembangkan perekonomian daerah

Contoh: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank pembangunan daerah, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Djaenuri (2014:99) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan atas pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 3) Jasa giro.
- 4) Pendapatan bunga deposito.
- 5) Penerimaan atau tuntutan ganti rugi.
- 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh daerah.
- 7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 8) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 9) Pendapatan denda pajak dan retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

2. Dana Perimbangan

Menurut Djaenuri (2014:100) menjelaskan bahwa

“Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mendukung pelaksanaan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan otonomi daerah yaitu terutama untuk peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa “Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
- 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerataan kemampuan keuangan daerah yang dimaksud dalam hal ini termasuk dalam kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan oleh masing-masing daerah yang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap dalam kerangka dalam pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) memperhatikan

ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat dipastikan untuk setiap tahunnya. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan yang diajukan kepada menteri teknis oleh daerah tersebut, yaitu dapat berupa rencana suatu proyek atau kegiatan tertentu atau dapat berupa dokumen program rencana pengeluaran tahunan. Kegiatan khusus yang dimaksud dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus alokasi umum yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain. Contoh: pembiayaan reboisasi daerah, saluran irigasi primer, dan lain sebagainya.

3. Pinjaman Daerah

Menurut Djaenuri (2014:108) dijelaskan bahwa:

“Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang dapat diperhitungkan dengan nominal uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayarnya kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan”.

Dana pinjaman daerah ini dapat digunakan semaksimal mungkin oleh pemerintah dalam rangka membiayai pengadaan sarana dan prasarana daerah yang nantinya akan bersifat meningkatkan penerimaan pendapatan. Selain itu, pinjaman daerah mungkin dilakukan dengan tujuan lain misalkan untuk mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.

Pinjaman daerah juga harus memperhatikan bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah tersebut karena jika tidak demikian maka akan menjadi beban anggaran di tahun-tahun yang akan datang.

4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut Djaenuri (2014:113)

“Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari selain Pendapatan Asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pinjaman daerah yang antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan pemerintah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya merupakan dana darurat. Dana darurat dipergunakan apabila pemerintah daerah mengalami keperluan yang mendesak, yaitu pada saat terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh pada saat terjadi bencana alam dan/atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional.

G. Kemandirian Keuangan Daerah

1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah pemerintah daerah yang dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Hal ini berarti yang dikatakan bahwa suatu daerah telah memiliki kemandirian dalam keuangan daerahnya adalah apabila suatu daerah sudah mampu dan dapat mengelola serta menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri

sehingga mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah dari pemerintah pusat.

2. Tujuan Kemandirian Keuangan Daerah

Tujuan kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah dapat menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal atau pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Pada era otonomi daerah, suatu daerah dituntut semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintahan pusat harus dikurangi. Adanya otonomi daerah maka daerah mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Untuk dapat rnencapai kemandirian keuangan daerah maka pendapatan asli daerah juga harus mampu menopang segala kebutuhan daerah (belanja daerah). Menurut Hanafi dan Nugroho (2009:76) menyatakan bahwa:

“Kemandirian suatu daerah tidak berarti setiap daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kemandirian dalam membiayai setidaknya adalah pengeluaran rutin dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap merupakan usaha yang harus ditingkatkan karena ditinjau dari derajat kebijakan penggunaan dana, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan yang paling memberikan otonomi kepada daerah”.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:232) rasio kemandirian

keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat, provinsi ataupun dari pinjaman. Formula perhitungan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya (Halim, 2007:233).

Berdasarkan Tabel 2 berikut ini akan menyajikan rasio kemandirian keuangan daerah beserta interpretasinya.

Tabel 2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegatif

Sumber: Mahsun (2006:187)

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Mahsun (2006:187) mengemukakan empat macam pola hubungan dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- a. Pola hubungan instruktif yaitu berarti bahwa pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif yaitu berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena pemerintah daerah sudah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif yaitu berarti bahwa peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandirian keuangan daerahnya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif yaitu berarti bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena pemerintah daerah yang bersangkutan telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

H. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Suatu daerah baik kabupaten/kota dikatakan dapat melakukan otonomi daerah yang baik dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Menurut Bisma (2010:77) tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tahar dan Zakhiya (2011) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh Proporsi Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Berdasarkan kemandirian keuangan daerah akan menunjukkan mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut. Menurut Bisma (2010:77) tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Proporsi pajak daerah merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan pajak daerah terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh Orang Pribadi (OP) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) menyatakan bahwa pajak daerah secara signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

3. Pengaruh Proporsi Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Menurut Bisma (2010:77) tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan

pinjaman. Proporsi retribusi daerah merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan retribusi daerah terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi (OP) atau badan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nggilu, *et al* (2016) menyebutkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

4. Pengaruh Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Suatu daerah dianggap dapat memiliki tingkat otonomi daerah yang baik dapat didasarkan pada tingkat kemandirian daerah tersebut. Menurut Bisma (2010:77) tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap

keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil keuntungan bersih perusahaan milik daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya, baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan hasil penelitian oleh Afarahim (2013) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki kontribusi sangat rendah.

5. Pengaruh Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

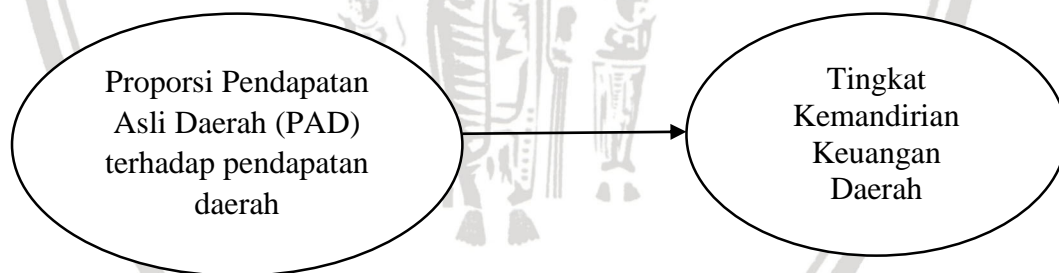
Suatu daerah dapat dikatakan melakukan otonomi daerah yang baik dapat dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Bisma (2010:77) tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah tidak termasuk dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novalistia (2016) menunjukkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara signifikan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

I. Model Konsep dan Model Hipotesis

1. Model Konsep

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada Bab I, adapun model konsep pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan melalui gambar berikut ini:



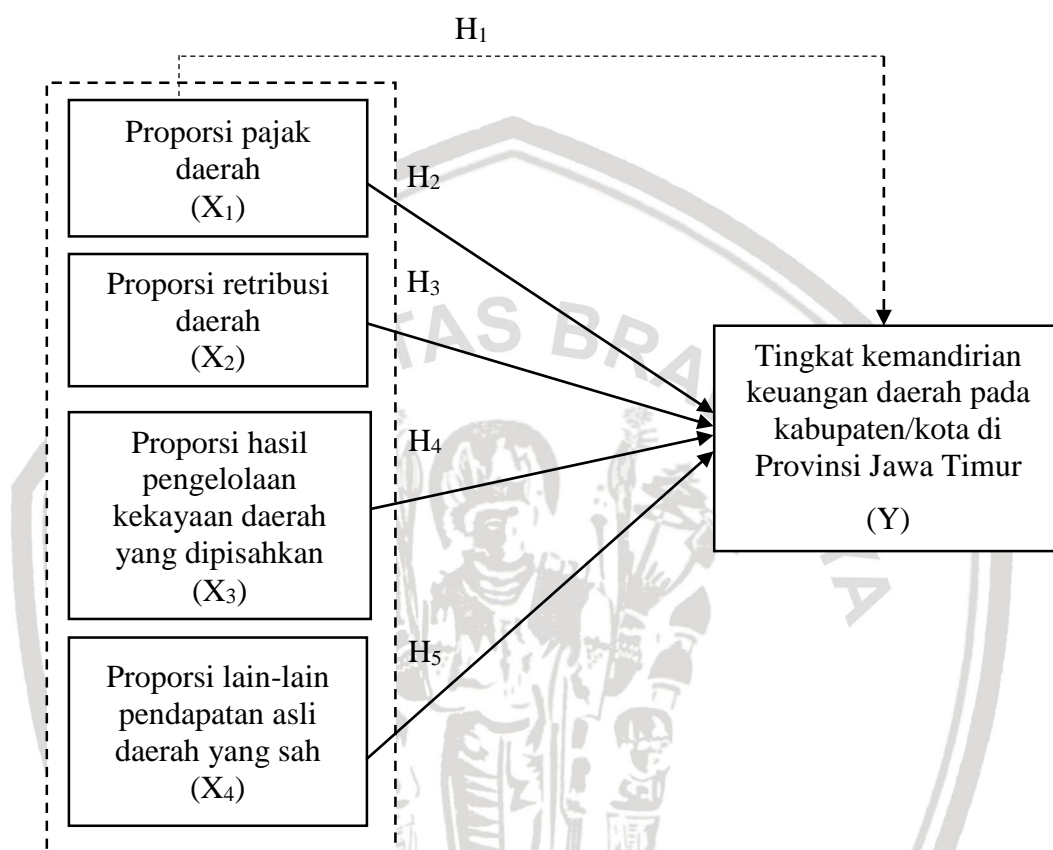
Gambar 1. Model Konsep

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

2. Model Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:159) mengemukakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian

yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Model Hipotesis ini dapat lebih jelasnya digambarkan melalui gambar 2, yaitu sebagai berikut :

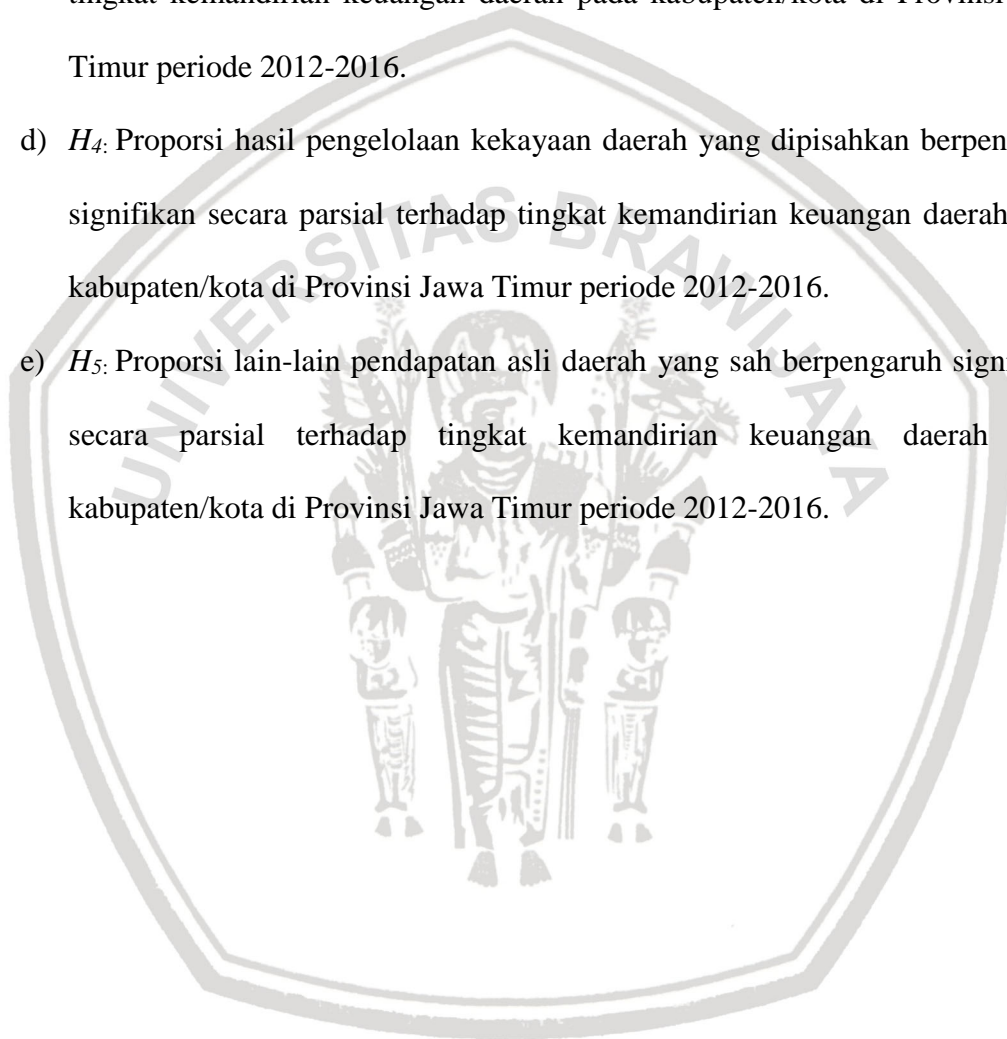


Gambar 2. Model Hipotesis
Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- a) H_1 : Proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

- b) H_2 : Proporsi pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.
- c) H_3 : Proporsi retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.
- d) H_4 : Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.
- e) H_5 : Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatory (*explanatory research*) atau penelitian penjelas. Menurut Siregar (2014:14) dijelaskan bahwa penelitian eksplanatory merupakan penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan mengenai kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Alasan mendasar peneliti memilih jenis penelitian eksplanatory adalah agar dapat menguji hipotesis yang telah diajukan sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini sehingga melalui penelitian eksplanatory ini hipotesis tersebut dapat dijelaskan bagaimana hubungan dan pengaruh antara variabel bebas (*independent*), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap variabel terikat (*dependent*), yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:7) pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat statistik atau kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2016:7).

B. Lokasi Penelitian dan Situs Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) melalui www.bps.go.id dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Departemen Keuangan melalui www.djpk.depkeu.go.id. Peneliti memilih situs penelitian ini dikarenakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Departemen Keuangan menyediakan sumber data yang sesuai dan diperlukan dalam penelitian ini, yaitu informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yaitu sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga data laporan anggaran dan realisasinya tersebut sudah terjamin keakuratannya.

C. Pengertian dan Pengukuran Variabel

1. Pengertian Variabel

Menurut Siregar (2014:18) variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri atas

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas (*independent variable*) yang diteliti adalah proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Secara lebih rinci, variabel independen dan dependen dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (X)

Menurut Siregar (2014:18) menjelaskan bahwa variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang menjadi sebab atau berubah atau memengaruhi suatu variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut:

1) Proporsi Pajak Daerah (X_1)

Proporsi pajak daerah merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan pajak daerah terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Menurut Siahaan (2016:9) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi (OP) atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Persentase pajak daerah adalah

$$= \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2) Proporsi Retribusi Daerah (X₂)

Proporsi retribusi daerah merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan retribusi daerah terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Menurut Siahaan (2016:6) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi (OP) atau badan yang telah menggunakan jasa atau pemberian izin tertentu tersebut. Persentase retribusi daerah adalah

$$= \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3) Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X₃)

Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan-perusahaan milik

daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Mahmudi, 2010:26). Persentase hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:

$$= \frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4) Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X₄)

Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan suatu ukuran mengenai besaran proporsi penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap keseluruhan pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, komisi, keuntungan selisih kurs, dan lain sebagainya (Mahmudi, 2010:26). Persentase lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah:

$$= \frac{\text{Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Variabel Terikat (Y)

Menurut Siregar (2014:19) menjelaskan bahwa variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel-variabel yang dipengaruhi

atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti bahwa suatu daerah sudah mampu dan dapat mengelola serta menggali sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri sehingga mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerahnya dari pemerintah pusat. Adapun untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung melalui rasio kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2007:232) adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan mengetahui variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu pengukuran variabel akan dibentuk dalam tabel agar lebih memudahkan dalam memahami variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Pengukuran Variabel

Variabel penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Proporsi pajak daerah (X ₁)	$= \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	(%) Persentase

Lanjutan Tabel 3. Pengukuran Variabel

Variabel penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Proporsi retribusi daerah (X_2)	$= \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	(%) Persentase
Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3)	$= \frac{\text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	(%) Persentase
Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4)	$= \frac{\text{Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	(%) Persentase
Tingkat kemandirian keuangan daerah (Y)	$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pinjaman}} \times 100\%$	(%) Persentase

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Siregar (2014:56) menjelaskan bahwa populasi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *population* yang berarti jumlah penduduk atau dapat dipakai untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur, yaitu terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 9 (sembilan) kota pada periode 2012 sampai dengan 2016.

2. Sampel Penelitian

Menurut Siregar (2014:56) menjelaskan bahwa sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian atau seluruh populasi yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta yang dikehendaki dari suatu populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik pengambilan sampel secara tidak acak (*non-probability sampling*), yaitu dengan cara sampel jenuh. Menurut Sugiyono (2016:85) sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Maka dari itu sampel dalam penelitian ini adalah 190 sampel berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) tahunan di 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan sembilan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan selama periode lima tahun, yaitu dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Berikut ini adalah nama kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Nama kabupaten/kota	No.	Nama kabupaten/kota
1.	Kabupaten Bangkalan	8.	Kabupaten Jombang
2.	Kabupaten Banyuwangi	9.	Kabupaten Kediri
3.	Kabupaten Blitar	10.	Kabupaten Lamongan
4.	Kabupaten Bojonegoro	11.	Kabupaten Lumajang
5.	Kabupaten Bondowoso	12.	Kabupaten Madiun
6.	Kabupaten Gresik	13.	Kabupaten Magetan
7.	Kabupaten Jember	14.	Kabupaten Malang

Lanjutan tabel 4. Nama Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Nama kabupaten/kota	No.	Nama kabupaten/kota
15.	Kabupaten Mojokerto	27.	Kabupaten Trenggalek
16.	Kabupaten Nganjuk	28.	Kabupaten Tuban
17.	Kabupaten Ngawi	29.	Kabupaten Tulungagung
18.	Kabupaten Pacitan	30.	Kota Batu
19.	Kabupaten Pamekasan	31.	Kota Blitar
20.	Kabupaten Pasuruan	32.	Kota Kediri
21.	Kabupaten Ponorogo	33.	Kota Madiun
22.	Kabupaten Probolinggo	34.	Kota Malang
23.	Kabupaten Sampang	35.	Koto Mojokerto
24.	Kabupaten Sidoarjo	36.	Kota Pasuruan
25.	Kabupaten Situbondo	37.	Kota Probolinggo
26.	Kabupaten Sumenep	38.	Kota Surabaya

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur

(www.bps-jatim.go.id), 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Siregar (2014:39) teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Menurut Agung (2012:66) Studi dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2012

sampai dengan 2016 yang dipublikasikan atau didapatkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu www.bps.go.id. Dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Departemen Keuangan, yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara peneliti mencari, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai teori dan konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini. Teori-teori dan konsep dasar tersebut diperoleh dari berbagai buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal keuangan daerah yang berkaitan sehubungan dengan penelitian ini.

F. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Menurut Siregar (2014:38) jenis data menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data kualitatif adalah data yang berupa pendapat (pernyataan) atau *judgement* sehingga tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata atau kalimat.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif karena data yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016 yang peneliti peroleh melalui website baik Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan.

Penelitian ini menggunakan data panel atau data longitudinal. Menurut Handika (2015:2017) data panel atau data longitudinal merupakan data yang terdiri dari komponen *cross section* (antar individu atau ruang) dan *time series* (antar waktu). Menurut Kennedy dalam Handika (2015:207) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) macam tipe format data panel, yaitu sebagai berikut:

- a. Tipe *long and narrow* (panjang dan sempit) berarti ketika jumlah waktu (T) relatif jauh lebih banyak daripada jumlah sampel (N). Contoh suatu data dengan 10 (sepuluh) periode waktu dan 5 (lima) institusi.
- b. Tipe *short and wide* (pendek dan lebar) berarti ketika jumlah sampel (N) relatif jauh lebih banyak daripada jumlah waktu (T). Contoh suatu data dengan 5 (lima) periode waktu dan 30 (tiga puluh) institusi.
- c. Tipe *long and wide* (panjang dan lebar) berarti ketika jumlah waktu (T) dan jumlah sampel (N) relatif besar. Contoh suatu data dengan 96 (sembilan puluh enam (96) periode waktu dan 100 (seratus) institusi.

Tipe format data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe *short and wide* karena periode waktu yang digunakan sempit yakni 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan sampel yang digunakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.

2. Sumber Data

Menurut Siregar (2014:37) Data menurut cara memperolehnya atau sumber data dalam sebuah penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b. Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk periode 2012-2016 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan juga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Departemen keuangan melalui websitenya, yaitu www.bps.go.id dan www.djpk.depkeu.go.id.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dalam rangka memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta variabel terikatnya adalah tingkat kemandirian keuangan daerah.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016:147) menjelaskan bahwa statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Pada statistik deskriptif ini peneliti akan mengemukakan cara-cara yang dilakukan dalam rangka penyajian data baik dengan menggunakan tabel biasa maupun dengan grafik garis atau batang.

2. Analisis Statistik Inferensial

Menurut Sugiyono (2016:148) menjelaskan bahwa:

“Statistik inferensial adalah tehnik statistik yang digunakan untuk menganalisis sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Selain itu analisis statistik inferensial juga disebut dengan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan sampel itu kebenarannya bersifat peluang (*probability*), yaitu peluang kesalahan dan kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase (%).

a. Uji Asumsi Klasik

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan program aplikasi komputer atau yang biasa disebut *Statistical Package for the Sosial Sciences* (SPSS). Pengujian yang perlu dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti adalah pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Hal ini dikarenakan pengujian uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar terbebas dari gejala heterokedastisitas, gejala multikolinearitas, dan gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah

memenuhi persyaratan *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). BLUE adalah tidak terdapat adanya heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

Hal ini berarti apabila terdapat heterokedastisitas maka varian dikatakan tidak konstan sehingga dapat menyebabkan biasnya standar error. Selanjutnya apabila terdapat multikolinearitas maka akan kesulitan untuk mengisolasi pengaruh-pengaruh individual dari setiap variabel sehingga tingkat signifikansi koefisien regresi menjadi rendah. Kemudian apabila terdapat autokorelasi maka akan mengakibatkan penaksir masih tetap bias dan masih tetap konsisten hanya saja menjadi lebih tidak efisien. Oleh karena itu, uji asumsi klasik ini sangat penting untuk dilakukan. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti yang telah diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal dikarenakan apabila asumsi ini tidak dilakukan atau dilanggar maka uji statistik akan menjadi tidak valid dalam hal jumlah sampel yang kecil. Menurut Ghazali (2011:110) menjabarkan bahwa

terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu sebagai berikut:

a) Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotnya data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b) Analisis Statistik

Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan nilai Z-skewness. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Pedoman pengambilan keputusan berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari :

- Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.
- Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

Apabila terdapat distribusi yang melanggar asumsi distribusi normalitas maka hal itu dapat menjadi distribusi normal melalui beberapa cara sebagai berikut:

a) Transformasi Data

Transformasi data dapat dilakukan dengan logaritma natural (\ln), \log_{10} maupun akar kuadrat. Jika terdapat data yang bernilai negatif maka transformasi data dengan logaritma akan menghilangkannya sehingga jumlah sampel (n) yang ada akan berkurang.

b) *Trimming*

Trimming adalah memangkas atau memotong atau membuang observasi. Cara *trimming* ini dapat dilakukan melalui standarisasi data, uji *box plot*, dan uji *scatterplot*. Cara *trimming* ini akan memperkecil jumlah sampel (n) yang terdapat pada data penelitian.

c) *Winzoring*

Winzoring adalah mengubah nilai-nilai outliers menjadi nilai-nilai yang minimum atau maksimum menurut yang telah diizinkan agar distribusinya menjadi normal. Apabila nilai-nilai observasi yang lebih kecil dari $\mu - 2\sigma$ maka akan diubah nilainya menjadi $\mu + 2\sigma$. Kemudian apabila nilai-nilai observasi yang lebih besar dari $\mu + 2\sigma$ maka akan diubah nilainya menjadi $\mu - 2\sigma$.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan dalam hal pengambilan keputusan akan tidak valid atau berubah-ubah. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan dengan cara melihat grafik *scatter plot* antara *Standardized Predicted Value* (ZPRED) dengan residualnya *Studentized Residual* (SRESID). Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

- a) Jika terdapat pola-pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak terdapat pola yang jelas atau titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau telah terjadi homoskedastisitas.

Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain adalah dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan cara meregresikan kembali nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hipotesis dari uji glejser adalah:

- a) Jika nilai $n \cdot R^2 > \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika nilai $n \cdot R^2 < \alpha = 0,05$ maka H_1 diterima atau terdapat heteroskedastisitas.

Apabila varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut dengan homoskedastisitas dan apabila varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

3) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011:91), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dijelaskan sebagai berikut:

- a) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independennya banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
- c) Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10 .

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Menurut Ghozali (2011:110) Jika terdapat korelasi maka dinamakan masalah autokorelasi. Pada uji autokorelasi ini untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji *Durbin Watson* (DW test), yaitu dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Pengambilan Keputusan

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada korelasi positif	Ditolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No <i>Decision</i>	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Ditolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No <i>Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Ghozali (2011:110)

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas dengan tujuannya untuk mengetahui, mengestimasi atau memprediksikan rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Model persamaan umum untuk regresi berganda adalah:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Rasio kemandirian keuangan daerah

α = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi dari proporsi pajak daerah

b_2 = Koefisien regresi dari proporsi retribusi daerah

b_3 = Koefisien regresi dari proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

b_4 = Koefisien regresi dari proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

X_1 = Proporsi Pajak Daerah

X_2 = Proporsi Retribusi Daerah

X_3 = Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

X_4 = Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

e = Kesalahan pengganggu (*error of term*)

Uji signifikansi variabel bebas dilakukan dengan cara melihat tabel hasil regresi. Apabila probabilitasnya dibawah $\alpha = 5\%$ maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

4. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi dilakukan untuk mengetahui berapa besar kemampuan variabel bebas secara bersama-sama atau serentak dalam memberi penjelasan terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Sehingga berarti dalam hal ini apabila $R^2 = 0$ maka menunjukkan tidak terdapat adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila R^2 semakin besar dengan mendekati angka satu maka menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian apabila R^2 semakin kecil atau mendekati angka nol maka dapat dikatakan bahwa semakin kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi ini memiliki kegunaan untuk menguji kekuatan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan cara membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Bentuk pengujiaanya adalah:

- 1) $H_0 : \beta_1 . \beta_2 . \beta_3 . \beta_4 = 0$ artinya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
- 2) $H_5 : \beta_1 . \beta_2 . \beta_3 . \beta_4 \neq 0$ artinya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$
- 2) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parsial (Uji t) memiliki tujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara

signifikan. Pengujian simultan ini menggunakan uji t, yaitu dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan nilai signifikansi harus kurang dari 0,05. Untuk pengujian secara parsial ini maka digunakan uji t. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 . \beta_2 . \beta_3 . \beta_4 = 0$ artinya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial tidak mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.
- 2) $H_1 : \beta_1 \neq 0$ artinya pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
- 3) $H_2 : \beta_2 \neq 0$ artinya retribusi daerah secara parsial memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
- 4) $H_3 : \beta_3 \neq 0$ artinya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial memiliki pengaruh terhadap keuangan daerah.
- 5) $H_4 : \beta_4 \neq 0$ artinya lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

- 1) H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$
- 2) H_0 diterima jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012 sampai dengan tahun 2016. Gambaran umum objek penelitian ini menjelaskan mengenai kondisi geografis, kondisi demografis atau kependudukan, dan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Timur.

1. Kondisi Geografis

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Provinsi ini disebut dengan Jawa Timur karena terletak di wilayah paling timur Pulau Jawa. Pulau Jawa terbagi menjadi enam provinsi yaitu Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, serta Jawa Timur. Secara astronomis wilayah Jawa Timur terletak pada $111^{\circ}0'$ hingga $114^{\circ}4'$ Bujur Timur, dan $7^{\circ}12'$ hingga $8^{\circ}48'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428 km^2 , terbagi ke dalam empat Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), 29 (dua puluh sembilan) kabupaten, sembilan kota, dan 658 kecamatan dengan 8.457 desa/kelurahan (2.400 kelurahan dan 6.097 desa).

Secara geografis, Provinsi Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa, yaitu berada di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada peta Jawa Timur berikut ini.



Gambar 3. Peta Jawa Timur

Sumber : Pemerintah Provinsi Jawa Timur (www.jatimprov.go.id), 2018

Apabila dilihat secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi dalam dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah Pulau Madura sekitar 10% dari luas wilayah Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah

pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa, di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah Pulau Kangean dan yang paling utara adalah Pulau Masalembu. Serta di bagian selatan terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung, dan Pulau Sempu.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 adalah 39.075.152 jiwa, dengan kepadatan 884 jiwa/km². Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk 2.560.675 jiwa, sedang kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 2.862.406 jiwa. Berikut ini adalah tabel mengenai jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 6. Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kabupaten Bangkalan	928.024	937.497	945.821	954.305	962.773
2.	Kabupaten Banyuwangi	1.574.528	1.582.586	1.588.082	1.594.083	1.599.811
3.	Kabupaten Blitar	1.130.423	1.136.701	1.140.793	1.145.396	1.149.710
4.	Kabupaten Bojonegoro	1.223.079	1.227.704	1.232.386	1.236.607	1.240.383
5.	Kabupaten Bondowoso	748.127	752.791	756.989	761.205	765.094
6.	Kabupaten Gresik	1.211.686	1.227.101	1.241.613	1.256.313	1.270.702

7.	Kabupaten Jember	2.367.482	2.381.400	2.394.608	2.407.115	2.419.000
8.	Kabupaten Jombang	1.220.404	1.230.881	1.234.501	1.240.985	1.247.303
9.	Kabupaten Kediri	1.521.895	1.530.504	1.538.929	1.546.883	1.554.385
10.	Kabupaten Lamongan	1.184.581	1.186.382	1.187.084	1.187.795	1.188.193
11.	Kabupaten Lumajang	1.017.900	1.023.818	1.026.378	1.030.193	1.033.698
12.	Kabupaten Madiun	669.088	671.883	673.988	676.087	677.993
13.	Kabupaten Magetan	624.373	625.703	626.614	627.413	627.984
14.	Kabupaten Malang	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315	2.560.675
15.	Kabupaten Mojokerto	1.049.886	1.057.808	1.070.486	1.080.389	1.090.075
16.	Kabupaten Nganjuk	1.028.914	1.033.597	1.037.723	1.041.716	1.045.375
17.	Kabupaten Ngawi	822.605	824.587	827.829	828.783	829.480
18.	Kabupaten Pacitan	545.905	547.917	549.481	550.986	552.307
19.	Kabupaten Pamekasan	817.690	827.407	836.224	845.314	854.194
20.	Kabupaten Pasuruan	1.543.723	1.556.711	1.569.507	1.581.787	1.593.683
21.	Kabupaten Ponorogo	861.806	863.890	865.809	867.393	868.814
22.	Kabupaten Probolinggo	1.116.390	1.123.204	1.132.690	1.140.480	1.148.012
23.	Kabupaten Sampang	903.613	913.499	925.911	936.801	947.614
24.	Kabupaten Sidoarjo	2.016.974	2.048.986	2.083.924	2.117.279	2150482
25.	Kabupaten Situbondo	657.874	660.702	666.013	669.713	673.282
26.	Kabupaten Sumenep	1.056.415	1.061.211	1.067.202	1.072.113	1.076.805
27.	Kabupaten Trenggalek	681.706	683.791	686.781	689.200	691.295
28.	Kabupaten Tuban	1.134.584	1.141.497	1.147.097	1.152.915	1.158.374

Lanjutan Tabel 6. Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016

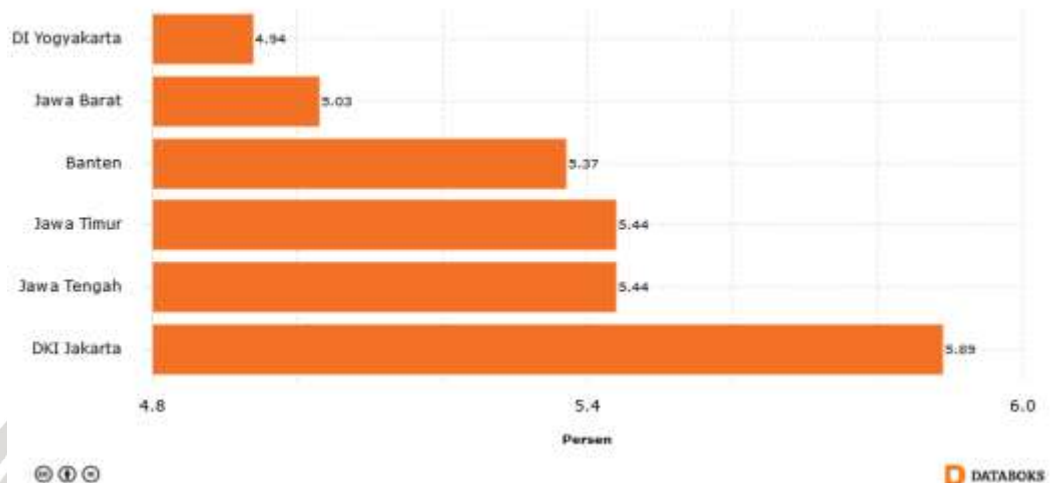
No	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (ribu)				
		2012	2013	2014	2015	2016
29.	Kabupaten Tulungagung	1.004.711	1.009.411	1.015.974	1.021.190	1.026.101
30.	Kota Batu	194.700	196.189	198.608	200.485	202.319
31.	Kota Blitar	134.723	135.702	136.903	137.908	139.117
32.	Kota Kediri	273.695	276.619	278.072	280.004	281.978
33.	Kota Madiun	172.886	174.114	174.373	174.995	175.607
34.	Kota Malang	834.527	840.803	845.973	851.298	856.410
35.	Kota Mojokerto	122.594	123.806	124.719	125.706	126.404
36.	Kota Pasuruan	190.191	192.285	193.329	194.815	196.202
37.	Kota Probolinggo	222.292	223.881	226.777	229.013	231.112
38.	Kota Surabaya	2.805.718	2.821.927	2.833.924	2.848.533	2.862.406
Jumlah		38.106.590	38.363.195	38.610.202	38.847.561	39.075.152

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Data diolah Peneliti, 2018.

3. Kondisi Ekonomi

Gambaran umum mengenai kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan atau proses kenaikan pendapatan suatu daerah. Berdasarkan data makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur didorong oleh tiga sektor utama, yaitu meliputi industri manufaktur, pertanian, serta sektor perdagangan.

Berikut ini adalah gambaran mengenai perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terdapat di Pulau Jawa pada tahun 2015.



Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2015

Sumber: www.databoks.katadata.co.id, 2018

Berdasarkan gambar 4 diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 dapat dikatakan tinggi yakni berada di posisi ke dua, yaitu sebesar 5,44 % setelah DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan dari sisi produksi hampir semua lapangan usaha di Provinsi Jawa timur mengalami kenaikan positif kecuali dikategori pengadaan listrik yaitu mengalami penurunan sebesar 3,47%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori industri pengolahan sebesar 28,57%, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,81%, dan kategori perdagangan besar eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,38%. Sementara itu, perekonomian Jawa Timur tahun 2015 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku, yaitu mencapai Rp 438,88 triliun

sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mencapai Rp 342,47 triliun.

B. Penyajian Data

1. Variabel Bebas (X)

a. Proporsi Pajak Daerah (X_1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Proporsi pajak daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel 7 berikut ini.

Tabel 7. Proporsi Pajak Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Pajak Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	1,27	1,22	1,43	1,52	1,76
2	Kabupaten Banyuwangi	2,38	3,44	3,89	4,17	4,31
3	Kabupaten Blitar	1,36	1,36	2,49	2,60	2,69
4	Kabupaten Bojonegoro	1,45	2,88	2,73	2,72	2,63
5	Kabupaten Bondowoso	0,94	0,88	1,39	1,25	1,28
6	Kabupaten Gresik	15,29	15,6	17,53	18,48	16,3
7	Kabupaten Jember	2,57	4,02	4,17	3,95	4,28
8	Kabupaten Jombang	2,22	2,36	3,50	3,73	4,05
9	Kabupaten Kediri	2,98	5,40	5,35	5,38	5,67
10	Kabupaten Lamongan	1,90	2,08	3,19	3,18	4,23
11	Kabupaten Lumajang	1,63	1,66	2,05	2,30	2,57
12	Kabupaten Madiun	1,36	1,36	2,02	2,25	2,48
13	Kabupaten Magetan	1,09	1,13	2,26	2,18	2,20
14	Kabupaten Malang	3,21	3,79	5,03	4,90	5,56
15	Kabupaten Mojokerto	8,06	8,06	9,80	10,81	11,60
16	Kabupaten Nganjuk	1,23	1,26	3,04	3,00	3,54
17	Kabupaten Ngawi	1,15	1,19	2,01	2,02	2,12
18	Kabupaten Pacitan	0,83	0,85	1,64	1,53	1,76

Lanjutan Tabel 7. Proporsi Pajak Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Pajak Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
19	Kabupaten Pamekasan	1,10	1,00	1,30	1,38	1,47
20	Kabupaten Pasuruan	7,15	9,13	9,62	9,69	8,49
21	Kabupaten Ponorogo	1,61	2,72	2,64	2,73	3,11
22	Kabupaten Probolinggo	1,35	1,48	1,99	2,18	2,24
23	Kabupaten Sampang	0,74	0,76	1,07	0,87	0,97
24	Kabupaten Sidoarjo	17,28	19,50	18,60	19,70	20,10
25	Kabupaten Situbondo	1,44	1,55	1,79	1,74	1,90
26	Kabupaten Sumenep	0,68	0,71	0,88	0,83	0,86
27	Kabupaten Trenggalek	0,88	0,91	1,53	1,57	1,66
28	Kabupaten Tuban	6,61	8,77	7,89	8,13	7,96
29	Kabupaten Tulungagung	1,64	1,68	2,68	2,63	2,62
30	Kota Batu	5,68	8,10	8,93	11,53	11,10
31	Kota Blitar	2,06	2,02	3,02	3,12	3,07
32	Kota Kediri	4,10	5,90	5,79	5,74	7,43
33	Kota Madiun	4,30	4,26	5,77	6,05	6,42
34	Kota Malang	11,70	15,60	15,80	17,31	21,50
35	Kota Mojokerto	3,10	4,12	3,64	4,37	4,38
36	Kota Pasuruan	2,71	3,56	3,10	3,82	3,64
37	Kota Probolinggo	2,27	3,07	2,80	3,10	3,51
38	Kota Surabaya	39,98	41,20	40,11	41,38	44,00
Nilai Minumum		0,68	0,71	0,88	0,83	0,86
Nilai Maksimum		39,98	41,20	40,11	41,38	44,00
Nilai Rata-rata		4,40	5,12	5,59	5,89	6,19

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti,
2018.

Berdasarkan data dari tabel 7 diatas menunjukkan proporsi pajak daerah setiap kabupaten dan kota mulai tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012, proporsi pajak daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 39,98% sedangkan proporsi pajak daerah terendah

dimiliki oleh Kabupaten Sumenep sebesar 0,68%. Pada tahun 2013, proporsi pajak daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 41,20% sedangkan proporsi pajak daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumenep sebesar 0,71%. Pada tahun 2014, proporsi pajak daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 40,11% sedangkan proporsi pajak daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumenep sebesar 0,88%. Pada tahun 2015, proporsi pajak daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 41,38% proporsi pajak daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumenep sebesar 0,83%. Kemudian Pada tahun 2016, proporsi pajak daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 44,00% sedangkan proporsi pajak daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumenep sebesar 0,86%.

b. Proporsi Retribusi Daerah (X₂) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Proporsi retribusi daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel 8 berikut ini

Tabel 8. Proporsi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Retribusi Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	1,94	1,93	1,23	0,95	0,83
2	Kabupaten Banyuwangi	1,47	1,49	2,78	1,13	1,23
3	Kabupaten Blitar	1,27	1,28	1,24	0,99	0,92
4	Kabupaten Bojonegoro	2,09	1,88	1,27	1,47	1,60
5	Kabupaten Bondowoso	1,85	1,57	0,82	0,97	0,80

Lanjutan Tabel 8. Proporsi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Retribusi Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
6	Kabupaten Gresik	3,82	3,74	5,03	4,83	3,06
7	Kabupaten Jember	1,88	1,87	2,24	1,11	1,14
8	Kabupaten Jombang	1,77	2,06	1,71	1,86	1,86
9	Kabupaten Kediri	1,25	1,29	1,87	0,92	1,22
10	Kabupaten Lamongan	0,98	1,78	1,66	1,01	1,00
11	Kabupaten Lumajang	1,97	1,69	2,44	1,42	1,45
12	Kabupaten Madiun	1,31	1,37	1,43	1,22	1,39
13	Kabupaten Magetan	1,70	1,88	1,26	1,30	1,11
14	Kabupaten Malang	1,93	1,79	1,70	1,16	1,19
15	Kabupaten Mojokerto	2,70	2,70	2,28	1,95	1,71
16	Kabupaten Nganjuk	1,19	1,24	1,18	1,20	1,12
17	Kabupaten Ngawi	0,78	1,14	0,94	0,83	0,79
18	Kabupaten Pacitan	1,47	1,73	1,62	1,43	1,69
19	Kabupaten Pamekasan	1,56	1,56	0,88	0,77	0,73
20	Kabupaten Pasuruan	3,81	2,31	2,76	1,86	1,63
21	Kabupaten Ponorogo	1,40	1,12	0,76	0,70	0,47
22	Kabupaten Probolinggo	1,88	1,88	2,20	1,12	1,25
23	Kabupaten Sampang	4,16	3,39	5,05	0,97	0,66
24	Kabupaten Sidoarjo	3,64	3,37	2,95	3,92	2,91
25	Kabupaten Situbondo	1,20	1,44	1,12	1,40	0,87
26	Kabupaten Sumenep	1,41	1,55	0,96	0,87	1,22
27	Kabupaten Trenggalek	2,15	2,13	2,16	1,64	1,00
28	Kabupaten Tuban	1,31	1,26	2,04	1,11	1,00
29	Kabupaten Tulungagung	1,00	1,08	1,29	0,82	0,88
30	Kota Batu	0,99	0,85	0,64	0,72	0,73
31	Kota Blitar	1,27	1,31	1,18	1,14	1,14
32	Kota Kediri	1,09	0,98	0,71	0,77	0,85
33	Kota Madiun	4,46	2,12	2,07	1,70	1,68
34	Kota Malang	2,62	2,52	2,58	1,93	2,46
35	Kota Mojokerto	5,43	1,72	1,58	1,65	1,61
36	Kota Pasuruan	3,48	2,55	1,36	1,06	1,00
37	Kota Probolinggo	1,79	1,74	1,76	1,48	1,45
38	Kota Surabaya	3,96	4,39	4,46	8,12	4,97

Lanjutan Tabel 8. Proporsi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Retribusi Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Nilai Minumum	0,78	0,85	0,64	0,70	0,47
	Nilai Maksimum	4,46	4,39	5,05	8,12	4,97
	Nilai Rata-rata	2,10	1,89	1,87	1,57	1,38

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan data dari tabel 8 diatas menunjukkan proporsi retribusi daerah setiap kabupaten dan kota mulai tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012, proporsi retribusi daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Madiun sebesar 4,46% sedangkan proporsi retribusi daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Ngawi sebesar 0,78%. Pada tahun 2013, proporsi retribusi daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 4,39% sedangkan proporsi retribusi daerah terendah dimiliki oleh Kota Batu sebesar 0,85%. Pada tahun 2014, proporsi retribusi daerah tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Sampang sebesar 5,05% sedangkan proporsi retribusi daerah terendah dimiliki oleh Kota Batu sebesar 0,64%. Pada tahun 2015, proporsi retribusi daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 8,12% proporsi retribusi daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 0,70%. Kemudian Pada tahun 2016, proporsi retribusi daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 4,97% sedangkan proporsi retribusi daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 0,47%.

c. Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(X3) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel 9 berikut ini

Tabel 9. Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	0,16	0,10	0,09	0,11	0,10
2	Kabupaten Banyuwangi	0,86	0,74	0,64	0,56	0,54
3	Kabupaten Blitar	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08
4	Kabupaten Bojonegoro	0,61	0,73	0,73	0,54	0,66
5	Kabupaten Bondowoso	0,46	0,27	0,23	0,20	0,19
6	Kabupaten Gresik	0,55	1,06	0,98	1,04	0,61
7	Kabupaten Jember	0,71	0,48	0,31	0,17	0,17
8	Kabupaten Jombang	0,16	0,16	0,13	0,13	0,11
9	Kabupaten Kediri	0,27	0,44	0,40	0,34	0,32
10	Kabupaten Lamongan	1,32	1,16	1,03	0,88	0,83
11	Kabupaten Lumajang	0,33	0,22	0,19	0,17	0,16
12	Kabupaten Madiun	0,24	0,37	0,25	0,26	0,28
13	Kabupaten Magetan	0,32	0,29	0,20	0,15	0,14
14	Kabupaten Malang	0,47	0,47	0,41	0,53	0,42
15	Kabupaten Mojokerto	0,26	0,26	0,21	0,20	0,21
16	Kabupaten Nganjuk	0,30	0,22	0,18	0,17	0,17
17	Kabupaten Ngawi	0,15	0,61	0,52	0,47	0,47
18	Kabupaten Pacitan	0,33	0,21	0,19	0,17	0,16
19	Kabupaten Pamekasan	0,21	0,14	0,12	0,11	0,10
20	Kabupaten Pasuruan	0,15	0,15	0,11	0,10	0,09
21	Kabupaten Ponorogo	0,10	0,07	0,06	0,05	0,05
22	Kabupaten Probolinggo	0,64	0,37	0,32	0,29	0,28

Lanjutan Tabel 9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
23	Kabupaten Sampang	0,70	0,61	0,43	0,69	0,36
24	Kabupaten Sidoarjo	0,52	0,87	0,93	0,77	0,73
25	Kabupaten Situbondo	0,43	0,39	0,30	0,28	0,27
26	Kabupaten Sumenep	0,90	0,73	0,72	0,64	0,74
27	Kabupaten Trenggalek	0,21	0,32	0,27	0,27	0,27
28	Kabupaten Tuban	1,05	0,62	0,54	0,53	0,51
29	Kabupaten Tulungagung	0,12	0,16	0,18	0,17	0,18
30	Kota Batu	0,34	0,37	0,31	0,30	0,27
31	Kota Blitar	0,18	0,14	0,13	0,13	0,12
32	Kota Kediri	0,15	0,06	0,07	0,08	0,13
33	Kota Madiun	0,94	1,17	1,00	1,14	1,12
34	Kota Malang	1,06	1,09	0,76	0,80	0,91
35	Kota Mojokerto	0,47	0,54	0,48	0,50	0,43
36	Kota Pasuruan	0,96	0,86	0,74	0,62	0,56
37	Kota Probolinggo	0,17	0,11	0,09	0,09	0,11
38	Kota Surabaya	2,11	2,14	2,00	2,04	1,93
	Nilai Minimum	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
	Nilai Maksimum	2,11	2,14	2,00	2,04	1,93
	Nilai Rata-rata	0,50	0,49	0,43	0,42	0,39

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti, 2018.

Berdasarkan data dari tabel 9 diatas menunjukkan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap kabupaten dan kota mulai tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012, proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 2,11% sedangkan proporsi hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan terendah dimiliki oleh Kabupaten Blitar sebesar 0,07%. Pada tahun 2013, proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 2,14% sedangkan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah dimiliki oleh Kota Kediri sebesar 0,06%. Pada tahun 2014, proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 2,00% sedangkan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 0,06%. Pada tahun 2015, proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 2,04% sedangkan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 0,05%. Kemudian Pada tahun 2016, proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 1,93% sedangkan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terendah dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 0,05%.

**d. Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (X₄)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel 10 berikut ini

**Tabel 10. Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun 2012-2016**

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	3,46	3,35	5,51	7,24	8,23
2	Kabupaten Banyuwangi	3,54	3,89	4,40	6,63	7,04
3	Kabupaten Blitar	4,24	4,47	5,96	6,54	6,32
4	Kabupaten Bojonegoro	4,41	5,16	6,84	6,92	6,45
5	Kabupaten Bondowoso	4,00	3,55	6,34	6,41	6,83
6	Kabupaten Gresik	6,27	6,91	8,22	8,48	8,36
7	Kabupaten Jember	6,76	6,66	9,03	9,59	10,84
8	Kabupaten Jombang	7,27	7,23	10,60	11,20	10,56
9	Kabupaten Kediri	3,63	4,23	6,67	6,92	6,95
10	Kabupaten Lamongan	4,59	4,60	7,96	8,13	8,79
11	Kabupaten Lumajang	4,91	5,08	7,88	8,56	8,95
12	Kabupaten Madiun	3,74	3,95	5,07	5,48	5,33
13	Kabupaten Magetan	4,12	3,87	5,88	7,02	6,47
14	Kabupaten Malang	3,28	4,31	6,30	6,71	7,45
15	Kabupaten Mojokerto	3,60	3,60	6,60	6,63	7,11
16	Kabupaten Nganjuk	6,30	7,10	9,60	9,89	10,57
17	Kabupaten Ngawi	2,90	3,12	6,58	6,67	6,51
18	Kabupaten Pacitan	3,35	3,14	4,59	5,74	6,24
19	Kabupaten Pamekasan	5,12	4,63	8,93	7,86	7,46
20	Kabupaten Pasuruan	1,25	3,70	6,60	7,34	6,83
21	Kabupaten Ponorogo	5,44	5,32	8,20	7,81	8,21
22	Kabupaten Probolinggo	3,12	4,13	7,29	7,67	7,46
23	Kabupaten Sampang	0,67	1,26	2,47	5,67	5,92
24	Kabupaten Sidoarjo	7,46	8,14	11,60	11,23	12,70
25	Kabupaten Situbondo	3,77	3,65	6,33	6,35	7,96
26	Kabupaten Sumenep	3,43	3,49	7,29	6,50	7,33
27	Kabupaten Trenggalek	3,38	3,09	4,92	6,56	8,23
28	Kabupaten Tuban	5,08	4,24	5,49	7,37	7,20
29	Kabupaten Tulungagung	7,64	6,94	8,92	9,45	9,64
30	Kota Batu	0,80	1,44	1,57	1,81	1,59

Lanjutan Tabel 10. Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
31	Kota Blitar	8,22	8,42	10,30	11,36	11,24
32	Kota Kediri	8,71	7,81	10,90	11,49	11,79
33	Kota Madiun	0,85	4,33	5,49	8,01	8,14
34	Kota Malang	1,56	1,59	1,97	3,19	2,55
35	Kota Mojokerto	1,35	6,80	9,57	11,50	12,48
36	Kota Pasuruan	1,28	4,49	9,15	10,04	13,52
37	Kota Probolinggo	7,05	6,56	10,80	11,89	14,26
38	Kota Surabaya	3,14	5,64	8,07	9,43	9,06
	Nilai Minumum	0,67	1,26	1,57	1,81	1,59
	Nilai Maksimum	8,71	8,42	11,60	11,89	14,26
	Nilai Rata-rata	4,20	4,73	7,10	7,82	8,23

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti,
2018.

Berdasarkan data dari tabel 10 diatas menunjukkan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setiap kabupaten dan kota mulai tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012, proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi dimiliki oleh Kota Kediri sebesar 8,71% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sampang sebesar 0,67%. Pada tahun 2013, proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi dimiliki oleh Kota Blitar sebesar 8,42% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sampang sebesar 1,26%. Pada tahun 2014, proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo sebesar 11,60% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terendah dimiliki oleh Kota Batu sebesar 1,57%. Pada tahun 2015, proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi dimiliki oleh Kota Probolinggo sebesar 11,89% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terendah dimiliki oleh Kota Batu sebesar 1,81%. Kemudian Pada tahun 2016, proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tertinggi dimiliki oleh Kota Probolinggo sebesar 14,26% sedangkan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terendah dimiliki oleh Kota Batu sebesar 1,59%.

2. Variabel Terikat (Y)

a. Tingkat Kemandirian Keuangan daerah (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung melalui rasio kemandirian keuangan daerah. Berikut ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2012 sampai tahun 2016 pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat melalui tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 11. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2012-2014

No	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	7,77	7,74	9,89	14,82	14,8

Lanjutan Tabel 11. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2012-
2014

No	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
2	Kabupaten Banyuwangi	9,35	14,00	14,25	23,22	19,9
3	Kabupaten Blitar	7,76	8,05	11,62	17,43	14,00
4	Kabupaten Bojonegoro	9,50	12,10	13,64	17,25	17,10
5	Kabupaten Bondowoso	8,32	8,87	13,75	15,12	13,60
6	Kabupaten Gresik	45,20	50,50	47,19	72,46	53,50
7	Kabupaten Jember	13,90	15,20	18,88	24,08	23,00
8	Kabupaten Jombang	13,30	17,50	19,70	31,09	25,30
9	Kabupaten Kediri	8,91	12,90	22,86	23,36	20,60
10	Kabupaten Lamongan	10,30	11,00	16,98	24,48	23,60
11	Kabupaten Lumajang	9,83	9,58	14,53	19,91	18,80
12	Kabupaten Madiun	7,35	7,79	9,94	14,70	12,70
13	Kabupaten Magetan	7,87	7,72	10,61	16,70	13,40
14	Kabupaten Malang	10,10	11,90	16,51	24,40	21,80
15	Kabupaten Mojokerto	18,10	18,10	25,72	38,45	34,00
16	Kabupaten Nganjuk	10,20	10,90	16,31	24,67	22,50
17	Kabupaten Ngawi	6,57	8,24	11,61	16,42	13,30
18	Kabupaten Pacitan	6,53	8,32	12,53	14,64	13,80
19	Kabupaten Pamekasan	9,21	8,26	13,81	16,16	13,70
20	Kabupaten Pasuruan	14,50	18,30	24,06	34,39	26,30
21	Kabupaten Ponorogo	9,70	10,30	13,70	18,41	16,50
22	Kabupaten Probolinggo	7,92	8,68	14,05	18,42	16,80
23	Kabupaten Sampang	7,00	6,61	11,05	13,39	11,00
24	Kabupaten Sidoarjo	40,60	47,40	53,01	91,23	79,00
25	Kabupaten Situbondo	8,97	7,69	11,21	15,25	14,80
26	Kabupaten Sumenep	7,15	8,28	11,29	13,15	13,80
27	Kabupaten Trenggalek	7,33	7,05	10,16	15,89	15,00
28	Kabupaten Tuban	16,60	17,70	19,41	30,32	25,20
29	Kabupaten Tulungagung	15,70	11,30	16,28	24,16	19,80
30	Kota Batu	8,59	12,10	12,93	20,69	17,50
31	Kota Blitar	13,30	13,50	17,12	25,09	21,20
32	Kota Kediri	17,00	20,60	21,20	28,67	28,30

Lanjutan Tabel 11. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2012-2014

No	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
33	Kota Madiun	14,60	17,30	22,24	27,57	24,10
34	Kota Malang	21,40	27,30	28,03	45,87	44,70
35	Kota Mojokerto	12,20	15,20	18,13	25,26	27,40
36	Kota Pasuruan	9,21	15,60	16,75	23,72	25,70
37	Kota Probolinggo	12,90	15,80	19,76	25,66	27,90
38	Kota Surabaya	96,80	114,00	121,50	291,40	211,00
	Nilai Minumum	6,53	7,05	9,94	13,15	11,00
	Nilai Maksimum	96,80	114,00	121,50	291,40	211,00
	Nilai Rata-rata	14,77	16,93	20,59	32,58	27,77

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti, 2018.

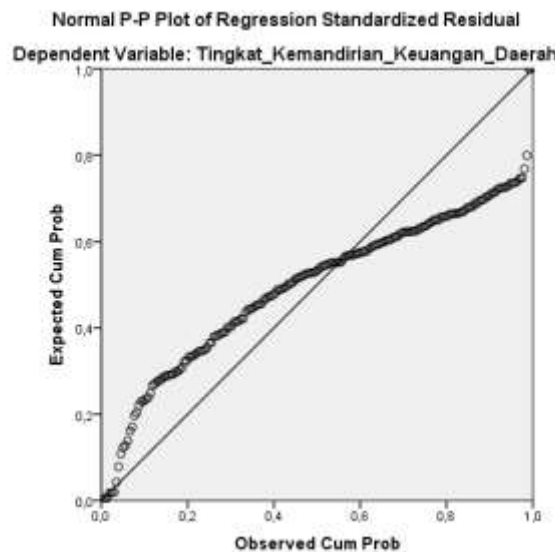
Berdasarkan data dari tabel 11 diatas menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah setiap kabupaten dan kota mulai tahun 2012 sampai dengan 2016. Pada tahun 2012, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 96,80% sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Pacitan sebesar 6,53%. Pada tahun 2013, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 114,00% sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek sebesar 7,05%. Pada tahun 2014, rasio kemandirian keuangan daerah dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 121,50% sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Madiun

sebesar 9,94%. Pada tahun 2015, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 291,40% sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumenep sebesar 13,15%. Kemudian Pada tahun 2016, rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sebesar 211,00% sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah terendah dimiliki oleh Kabupaten Sampang sebesar 11,00%.

C. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif dan analisis data inferensial. Pada saat melakukan analisis data inferensial, yaitu pengujian asumsi klasik pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur hasil menunjukkan bahwa uji normalitas dinyatakan berdistribusi tidak normal dan untuk uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi dikatakan tidak lolos karena tidak sesuai dengan kriteria yang ada disetiap pengujian tersebut.. Distribusi data pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur berdistribusi tidak normal disebabkan terdapat data *outlier* pada sampel. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi maka data outlier harus dikeluarkan. Berikut ini adalah deteksi dan proses pengeluaran data outlier pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, analisis deskriptif, dan analisis inferensial.

1. Hasil Uji Normalitas Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur



Gambar 5. Normal Probability Plot Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

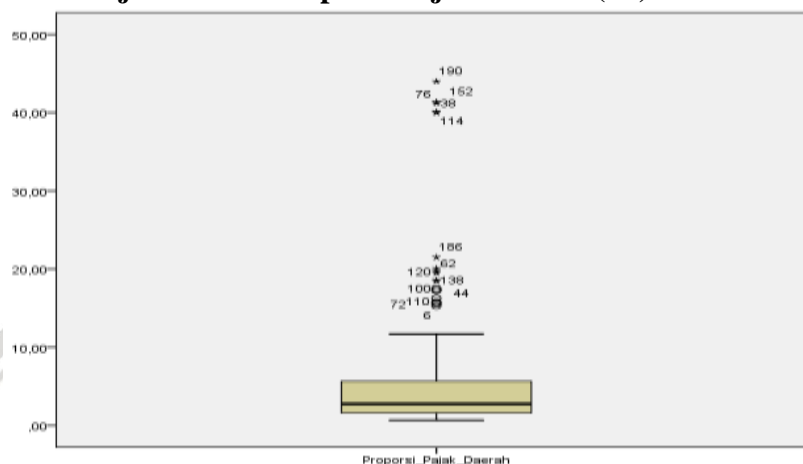
Berdasarkan gambar normal P-P Plot diatas dapat dijelaskan bahwa titik-titik menyebar tidak mengikuti garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas atau dikatakan tidak memiliki distribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut data yang memiliki *outlier* atau ekstrim harus dikeluarkan dari sampel penelitian

2. Prosedur data outlier

Menurut Ghozali (2011:41) *outlier* adalah data yang muncul memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi lainnya dalam bentuk nilai ekstrim. Data *outlier* dapat diketahui melalui *Box Plot*. *Box Plot* merupakan metode grafik yang mudah digunakan dan diinterpretasikan untuk memperoleh informasi data *outlier* atau data ekstrim dari sebuah sampel dalam penelitian. Berikut ini akan disajikan hasil output *Box Plot*

data dari 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki data *outlier*.

a. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Pajak Daerah (X_1)



Gambar 6. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Pajak Daerah (X_1)

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui bahwa terdapat data *outlier* pada data sampel yang diteliti. Data *outlier* tersebut akan dijelaskan melalui tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Pajak Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Pajak Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	1,27	1,22	1,43	1,52	1,76
2	Kabupaten Banyuwangi	2,38	3,44	3,89	4,17	4,31
3	Kabupaten Blitar	1,36	1,36	2,49	2,60	2,69
4	Kabupaten Bojonegoro	1,45	2,88	2,73	2,72	2,63
5	Kabupaten Bondowoso	0,94	0,88	1,39	1,25	1,28
6	Kabupaten Gresik*	*15,29	*15,60	17,53	*18,48	16,3
7	Kabupaten Jember	2,57	4,02	4,17	3,95	4,28
8	Kabupaten Jombang	2,22	2,36	3,50	3,73	4,05
9	Kabupaten Kediri	2,98	5,40	5,35	5,38	5,67
10	Kabupaten Lamongan	1,90	2,08	3,19	3,18	4,23

Lanjutan Tabel 12. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Pajak Daerah

Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Pajak Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
11	Kabupaten Lumajang	1,63	1,66	2,05	2,30	2,57
12	Kabupaten Madiun	1,36	1,36	2,02	2,25	2,48
13	Kabupaten Magetan	1,09	1,13	2,26	2,18	2,20
14	Kabupaten Malang	3,21	3,79	5,03	4,90	5,56
15	Kabupaten Mojokerto	8,06	8,06	9,80	10,81	11,60
16	Kabupaten Nganjuk	1,23	1,26	3,04	3,00	3,54
17	Kabupaten Ngawi	1,15	1,19	2,01	2,02	2,12
18	Kabupaten Pacitan	0,83	0,85	1,64	1,53	1,76
19	Kabupaten Pamekasan	1,10	1,00	1,30	1,38	1,47
20	Kabupaten Pasuruan	7,15	9,13	9,62	9,69	8,49
21	Kabupaten Ponorogo	1,61	2,72	2,64	2,73	3,11
22	Kabupaten Probolinggo	1,35	1,48	1,99	2,18	2,24
23	Kabupaten Sampang	0,74	0,76	1,07	0,87	0,97
24	Kabupaten Sidoarjo*	17,28	*19,50	*18,60	*19,70	20,10
25	Kabupaten Situbondo	1,44	1,55	1,79	1,74	1,90
26	Kabupaten Sumenep	0,68	0,71	0,88	0,83	0,86
27	Kabupaten Trenggalek	0,88	0,91	1,53	1,57	1,66
28	Kabupaten Tuban	6,61	8,77	7,89	8,13	7,96
29	Kabupaten Tulungagung	1,64	1,68	2,68	2,63	2,62
30	Kota Batu	5,68	8,10	8,93	11,53	11,10
31	Kota Blitar	2,06	2,02	3,02	3,12	3,07
32	Kota Kediri	4,10	5,90	5,79	5,74	7,43
33	Kota Madiun	4,30	4,26	5,77	6,05	6,42
34	Kota Malang*	11,70	*15,60	*15,80	17,31	*21,50
35	Kota Mojokerto	3,10	4,12	3,64	4,37	4,38
36	Kota Pasuruan	2,71	3,56	3,10	3,82	3,64
37	Kota Probolinggo	2,27	3,07	2,80	3,10	3,51
38	Kota Surabaya*	*39,98	*41,20	*40,11	*41,38	*44,00
Nilai Minimum		0,68	0,71	0,88	0,83	0,86
Nilai Maksimum		39,98	41,20	40,11	41,38	44,00
Nilai Rata-rata		4,40	5,12	5,59	5,89	6,19

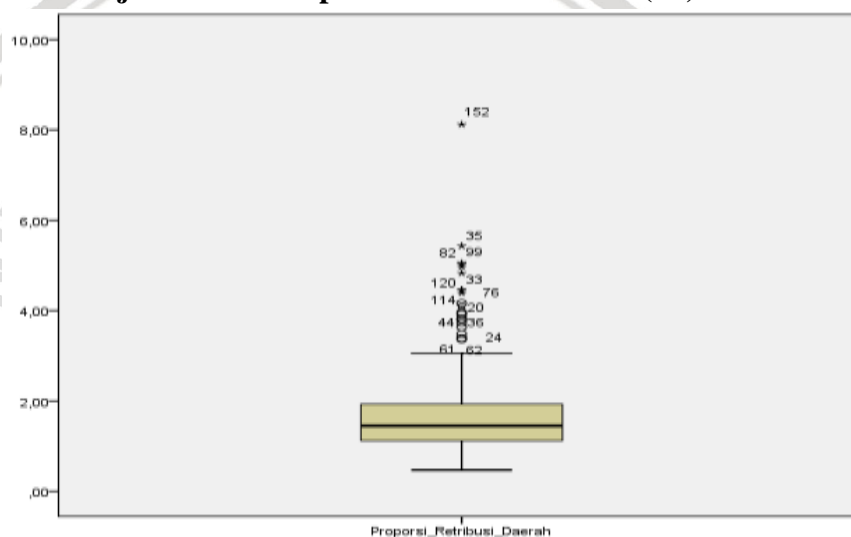
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti, 2018.

Keterangan : (*) terdapat data ekstrim

Berdasarkan penyajian data *outlier* pada tabel 12 diketahui terdapat data ekstrim pada empat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kota Surabaya.

b. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Retribusi Daerah (X₂)



Gambar 7. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Retribusi Daerah (X₂)

Sumber : Data diolah, Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 7 dapat diketahui bahwa terdapat data *outlier* pada data sampel yang diteliti. Data *outlier* tersebut akan dijelaskan melalui tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Retribusi Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Retribusi Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	1,94	1,93	1,23	0,95	0,83
2	Kabupaten Banyuwangi	1,47	1,49	2,78	1,13	1,23

Lanjutan Tabel 13. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Retribusi

Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Retribusi Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
3	Kabupaten Blitar	1,27	1,28	1,24	0,99	0,92
4	Kabupaten Bojonegoro	2,09	1,88	1,27	1,47	1,60
5	Kabupaten Bondowoso	1,85	1,57	0,82	0,97	0,80
6	Kabupaten Gresik*	3,82	*3,74	*5,03	*4,83	3,06
7	Kabupaten Jember	1,88	1,87	2,24	1,11	1,14
8	Kabupaten Jombang	1,77	2,06	1,71	1,86	1,86
9	Kabupaten Kediri	1,25	1,29	1,87	0,92	1,22
10	Kabupaten Lamongan	0,98	1,78	1,66	1,01	1,00
11	Kabupaten Lumajang	1,97	1,69	2,44	1,42	1,45
12	Kabupaten Madiun	1,31	1,37	1,43	1,22	1,39
13	Kabupaten Magetan	1,70	1,88	1,26	1,30	1,11
14	Kabupaten Malang	1,93	1,79	1,70	1,16	1,19
15	Kabupaten Mojokerto	2,70	2,70	2,28	1,95	1,71
16	Kabupaten Nganjuk	1,19	1,24	1,18	1,20	1,12
17	Kabupaten Ngawi	0,78	1,14	0,94	0,83	0,79
18	Kabupaten Pacitan	1,47	1,73	1,62	1,43	1,69
19	Kabupaten Pamekasan	1,56	1,56	0,88	0,77	0,73
20	Kabupaten Pasuruan*	*3,81	2,31	2,76	1,86	1,63
21	Kabupaten Ponorogo	1,40	1,12	0,76	0,70	0,47
22	Kabupaten Probolinggo	1,88	1,88	2,20	1,12	1,25
23	Kabupaten Sampang*	4,16	*3,39	*5,05	0,97	0,66
24	Kabupaten Sidoarjo*	*3,64	*3,37	2,95	3,92	2,91
25	Kabupaten Situbondo	1,20	1,44	1,12	1,40	0,87
26	Kabupaten Sumenep	1,41	1,55	0,96	0,87	1,22
27	Kabupaten Trenggalek	2,15	2,13	2,16	1,64	1,00
28	Kabupaten Tuban	1,31	1,26	2,04	1,11	1,00
29	Kabupaten Tulungagung	1,00	1,08	1,29	0,82	0,88
30	Kota Batu	0,99	0,85	0,64	0,72	0,73
31	Kota Blitar	1,27	1,31	1,18	1,14	1,14
32	Kota Kediri	1,09	0,98	0,71	0,77	0,85
33	Kota Madiun*	*4,46	2,12	2,07	1,70	1,68
34	Kota Malang	2,62	2,52	2,58	1,93	2,46

Lanjutan Tabel 13. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Retribusi

Daerah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Retribusi Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
35	Kota Mojokerto*	*5,43	1,72	1,58	1,65	1,61
36	Kota Pasuruan*	*3,48	2,55	1,36	1,06	1,00
37	Kota Probolinggo	1,79	1,74	1,76	1,48	1,45
38	Kota Surabaya*	3,96	*4,39	*4,46	*8,12	4,97
Nilai Minumum		0,78	0,85	0,64	0,70	0,47
Nilai Maksimum		4,46	4,39	5,05	8,12	4,97
Nilai Rata-rata		2,10	1,89	1,87	1,57	1,38

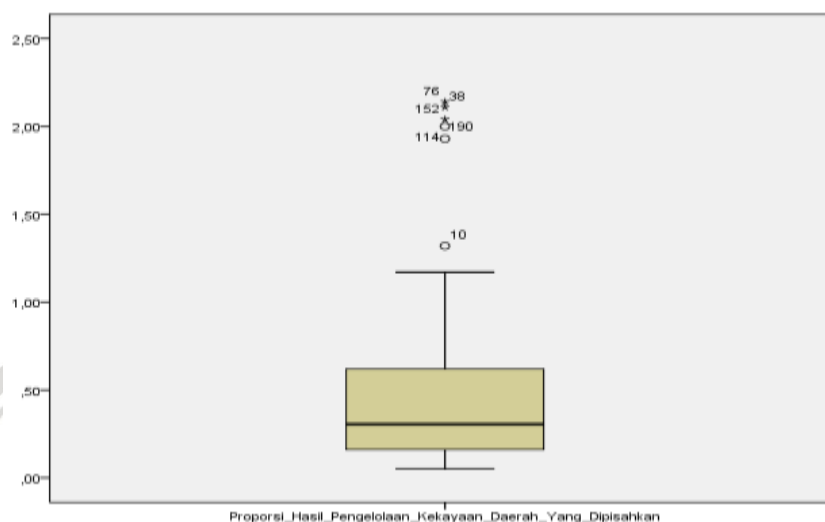
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti,
2018.

Keterangan : (*) terdapat data ekstrim

Berdasarkan penyajian data *outlier* pada tabel 13 diketahui terdapat data ekstrim pada delapan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya.

c. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3)



Gambar 8. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (X_3)

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 8 dapat diketahui bahwa terdapat data *outlier* pada data sampel yang diteliti. Data *outlier* tersebut akan dijelaskan melalui tabel 14 berikut ini.

Tabel 14. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	0,16	0,10	0,09	0,11	0,10
2	Kabupaten Banyuwangi	0,86	0,74	0,64	0,56	0,54
3	Kabupaten Blitar	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08
4	Kabupaten Bojonegoro	0,61	0,73	0,73	0,54	0,66
5	Kabupaten Bondowoso	0,46	0,27	0,23	0,20	0,19
6	Kabupaten Gresik	0,55	1,06	0,98	1,04	0,61
7	Kabupaten Jember	0,71	0,48	0,31	0,17	0,17
8	Kabupaten Jombang	0,16	0,16	0,13	0,13	0,11

Lanjutan Tabel 14. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
9	Kabupaten Kediri	0,27	0,44	0,40	0,34	0,32
10	Kabupaten Lamongan*	*1,32	1,16	1,03	0,88	0,83
11	Kabupaten Lumajang	0,33	0,22	0,19	0,17	0,16
12	Kabupaten Madiun	0,24	0,37	0,25	0,26	0,28
13	Kabupaten Magetan	0,32	0,29	0,20	0,15	0,14
14	Kabupaten Malang	0,47	0,47	0,41	0,53	0,42
15	Kabupaten Mojokerto	0,26	0,26	0,21	0,20	0,21
16	Kabupaten Nganjuk	0,30	0,22	0,18	0,17	0,17
17	Kabupaten Ngawi	0,15	0,61	0,52	0,47	0,47
18	Kabupaten Pacitan	0,33	0,21	0,19	0,17	0,16
19	Kabupaten Pamekasan	0,21	0,14	0,12	0,11	0,10
20	Kabupaten Pasuruan	0,15	0,15	0,11	0,10	0,09
21	Kabupaten Ponorogo	0,10	0,07	0,06	0,05	0,05
22	Kabupaten Probolinggo	0,64	0,37	0,32	0,29	0,28
23	Kabupaten Sampang	0,70	0,61	0,43	0,69	0,36
24	Kabupaten Sidoarjo	0,52	0,87	0,93	0,77	0,73
25	Kabupaten Situbondo	0,43	0,39	0,30	0,28	0,27
26	Kabupaten Sumenep	0,90	0,73	0,72	0,64	0,74
27	Kabupaten Trenggalek	0,21	0,32	0,27	0,27	0,27
28	Kabupaten Tuban	1,05	0,62	0,54	0,53	0,51
29	Kabupaten Tulungagung	0,12	0,16	0,18	0,17	0,18
30	Kota Batu	0,34	0,37	0,31	0,30	0,27
31	Kota Blitar	0,18	0,14	0,13	0,13	0,12
32	Kota Kediri	0,15	0,06	0,07	0,08	0,13
33	Kota Madiun	0,94	1,17	1,00	1,14	1,12
34	Kota Malang	1,06	1,09	0,76	0,80	0,91
35	Kota Mojokerto	0,47	0,54	0,48	0,50	0,43
36	Kota Pasuruan	0,96	0,86	0,74	0,62	0,56
37	Kota Probolinggo	0,17	0,11	0,09	0,09	0,11

Lanjutan Tabel 14. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
38	Kota Surabaya*	*2,11	*2,14	*2,00	*2,04	*1,93
	Nilai Minimum	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05
	Nilai Maksimum	2,11	2,14	2,00	2,04	1,93
	Nilai Rata-rata	0,50	0,49	0,43	0,42	0,39

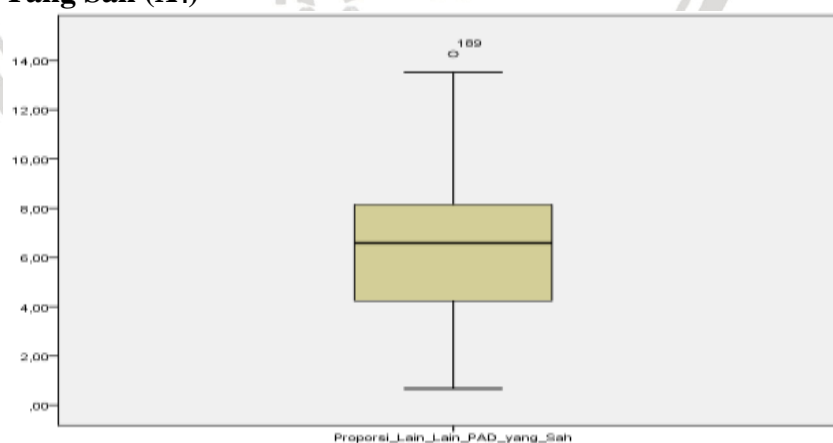
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti, 2018.

Keterangan : (*) terdapat data ekstrim

Berdasarkan penyajian data *outlier* pada tabel 14 diketahui terdapat data ekstrim pada dua kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Lamongan dan Kota Surabaya.

d. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X_4)



Gambar 9. Hasil Uji *Box Plot* Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X_4)

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 9 dapat diketahui bahwa terdapat data *outlier* pada data sampel yang diteliti. Data *outlier* tersebut akan dijelaskan melalui tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	3,46	3,35	5,51	7,24	8,23
2	Kabupaten Banyuwangi	3,54	3,89	4,40	6,63	7,04
3	Kabupaten Blitar	4,24	4,47	5,96	6,54	6,32
4	Kabupaten Bojonegoro	4,41	5,16	6,84	6,92	6,45
5	Kabupaten Bondowoso	4,00	3,55	6,34	6,41	6,83
6	Kabupaten Gresik	6,27	6,91	8,22	8,48	8,36
7	Kabupaten Jember	6,76	6,66	9,03	9,59	10,84
8	Kabupaten Jombang	7,27	7,23	10,60	11,20	10,56
9	Kabupaten Kediri	3,63	4,23	6,67	6,92	6,95
10	Kabupaten Lamongan	4,59	4,60	7,96	8,13	8,79
11	Kabupaten Lumajang	4,91	5,08	7,88	8,56	8,95
12	Kabupaten Madiun	3,74	3,95	5,07	5,48	5,33
13	Kabupaten Magetan	4,12	3,87	5,88	7,02	6,47
14	Kabupaten Malang	3,28	4,31	6,30	6,71	7,45
15	Kabupaten Mojokerto	3,60	3,60	6,60	6,63	7,11
16	Kabupaten Nganjuk	6,30	7,10	9,60	9,89	10,57
17	Kabupaten Ngawi	2,90	3,12	6,58	6,67	6,51
18	Kabupaten Pacitan	3,35	3,14	4,59	5,74	6,24
19	Kabupaten Pamekasan	5,12	4,63	8,93	7,86	7,46
20	Kabupaten Pasuruan	1,25	3,70	6,60	7,34	6,83
21	Kabupaten Ponorogo	5,44	5,32	8,20	7,81	8,21
22	Kabupaten Probolinggo	3,12	4,13	7,29	7,67	7,46
23	Kabupaten Sampang	0,67	1,26	2,47	5,67	5,92
24	Kabupaten Sidoarjo	7,46	8,14	11,60	11,23	12,70

Lanjutan Tabel 15. Pemindaian Data *Outlier* Pada Proporsi Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2012-2016

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
25	Kabupaten Situbondo	3,77	3,65	6,33	6,35	7,96
26	Kabupaten Sumenep	3,43	3,49	7,29	6,50	7,33
27	Kabupaten Trenggalek	3,38	3,09	4,92	6,56	8,23
28	Kabupaten Tuban	5,08	4,24	5,49	7,37	7,20
29	Kabupaten Tulungagung	7,64	6,94	8,92	9,45	9,64
30	Kota Batu	0,80	1,44	1,57	1,81	1,59
31	Kota Blitar	8,22	8,42	10,30	11,36	11,24
32	Kota Kediri	8,71	7,81	10,90	11,49	11,79
33	Kota Madiun	0,85	4,33	5,49	8,01	8,14
34	Kota Malang	1,56	1,59	1,97	3,19	2,55
35	Kota Mojokerto	1,35	6,80	9,57	11,50	12,48
36	Kota Pasuruan	1,28	4,49	9,15	10,04	13,52
37	Kota Probolinggo*	7,05	6,56	10,80	11,89	*14,26
38	Kota Surabaya	3,14	5,64	8,07	9,43	9,06
	Nilai Minumum	0,67	1,26	1,57	1,81	1,59
	Nilai Maksimum	8,71	8,42	11,60	11,89	14,26
	Nilai Rata-rata	4,20	4,73	7,10	7,82	8,23

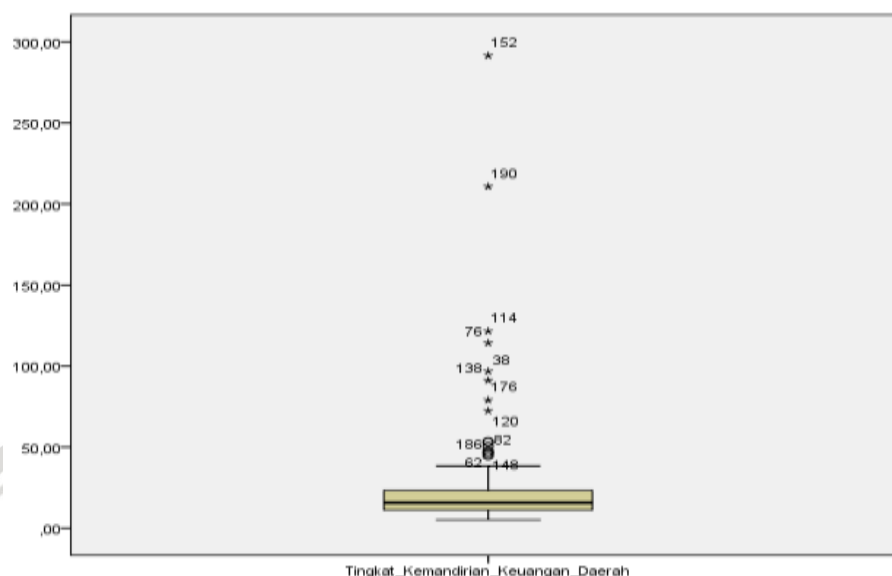
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti,
2018.

Keterangan : (*) terdapat data ekstrim

Berdasarkan penyajian data *outlier* pada tabel 15 diketahui terdapat data ekstrim pada satu kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Probolinggo.

e. Hasil Uji *Box Plot* Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y)



Gambar 10. Hasil Output *Box Plot* Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 10 dapat diketahui bahwa terdapat data *outlier* pada data sampel yang diteliti. Data *outlier* tersebut akan dijelaskan melalui tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Pemindaian Data *Outlier* Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2012-2014

No	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	7,77	7,74	9,89	14,82	14,8
2	Kabupaten Banyuwangi	9,35	14,00	14,25	23,22	19,9
3	Kabupaten Blitar	7,76	8,05	11,62	17,43	14,00
4	Kabupaten Bojonegoro	9,50	12,10	13,64	17,25	17,10
5	Kabupaten Bondowoso	8,32	8,87	13,75	15,12	13,60
6	Kabupaten Gresik*	45,20	50,50	*47,19	*72,46	53,50
7	Kabupaten Jember	13,90	15,20	18,88	24,08	23,00
8	Kabupaten Jombang	13,30	17,50	19,70	31,09	25,30
9	Kabupaten Kediri	8,91	12,90	22,86	23,36	20,60

Lanjutan Tabel 16. Pemindaian Data *Outlier* Pada Tingkat Kemandirian

Keuangan Daerah Tahun 2012-2014

No	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
10	Kabupaten Lamongan	10,30	11,00	16,98	24,48	23,60
11	Kabupaten Lumajang	9,83	9,58	14,53	19,91	18,80
12	Kabupaten Madiun	7,35	7,79	9,94	14,70	12,70
13	Kabupaten Magetan	7,87	7,72	10,61	16,70	13,40
14	Kabupaten Malang	10,10	11,90	16,51	24,40	21,80
15	Kabupaten Mojokerto	18,10	18,10	25,72	38,45	34,00
16	Kabupaten Nganjuk	10,20	10,90	16,31	24,67	22,50
17	Kabupaten Ngawi	6,57	8,24	11,61	16,42	13,30
18	Kabupaten Pacitan	6,53	8,32	12,53	14,64	13,80
19	Kabupaten Pamekasan	9,21	8,26	13,81	16,16	13,70
20	Kabupaten Pasuruan	14,50	18,30	24,06	34,39	26,30
21	Kabupaten Ponorogo	9,70	10,30	13,70	18,41	16,50
22	Kabupaten Probolinggo	7,92	8,68	14,05	18,42	16,80
23	Kabupaten Sampang	7,00	6,61	11,05	13,39	11,00
24	Kabupaten Sidoarjo*	40,60	*47,40	53,01	*91,23	*79,00
25	Kabupaten Situbondo	8,97	7,69	11,21	15,25	14,80
26	Kabupaten Sumenep	7,15	8,28	11,29	13,15	13,80
27	Kabupaten Trenggalek	7,33	7,05	10,16	15,89	15,00
28	Kabupaten Tuban	16,60	17,70	19,41	30,32	25,20
29	Kabupaten Tulungagung	15,70	11,30	16,28	24,16	19,80
30	Kota Batu	8,59	12,10	12,93	20,69	17,50
31	Kota Blitar	13,30	13,50	17,12	25,09	21,20
32	Kota Kediri	17,00	20,60	21,20	28,67	28,30
33	Kota Madiun	14,60	17,30	22,24	27,57	24,10
34	Kota Malang*	21,40	27,30	28,03	*45,87	*44,70
35	Kota Mojokerto	12,20	15,20	18,13	25,26	27,40
36	Kota Pasuruan	9,21	15,60	16,75	23,72	25,70
37	Kota Probolinggo	12,90	15,80	19,76	25,66	27,90
38	Kota Surabaya*	*96,80	*114,00	*121,50	*291,40	*211,00
Nilai Minimum		6,53	7,05	9,94	13,15	11,00

Lanjutan Tabel 16. Pemindaian Data *Outlier* Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2012-2014

No	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Nilai Maksimum	96,80	114,00	121,50	291,40	211,00
	Nilai Rata-rata	14,77	16,93	20,59	32,58	27,77

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Departemen Keuangan Tahun 2012-2016, Data diolah Peneliti, 2018.

Keterangan : (*) terdapat data ekstrim

Berdasarkan penyajian data *outlier* pada tabel 16 diketahui terdapat data ekstrim pada empat kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kota Surabaya.

f. Data *Outlier* pada sampel penelitian.

Berikut ini adalah tabel mengenai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki data ekstrim di setiap variabel-variabelnya sehingga kabupaten/kota tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Tabel 17. Data *Outlier* Pada Sampel Penelitian

No	Nama Kabupaten/Kota	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y	Sampel
1	Kabupaten Bangkalan						√
2	Kabupaten Banyuwangi						√
3	Kabupaten Blitar						√
4	Kabupaten Bojonegoro						√
5	Kabupaten Bondowoso						√
6	Kabupaten Gresik	X	X			X	X
7	Kabupaten Jember						√
8	Kabupaten Jombang						√
9	Kabupaten Kediri						√

Lanjutan Tabel 17. Data *Outlier* Pada Sampel Penelitian

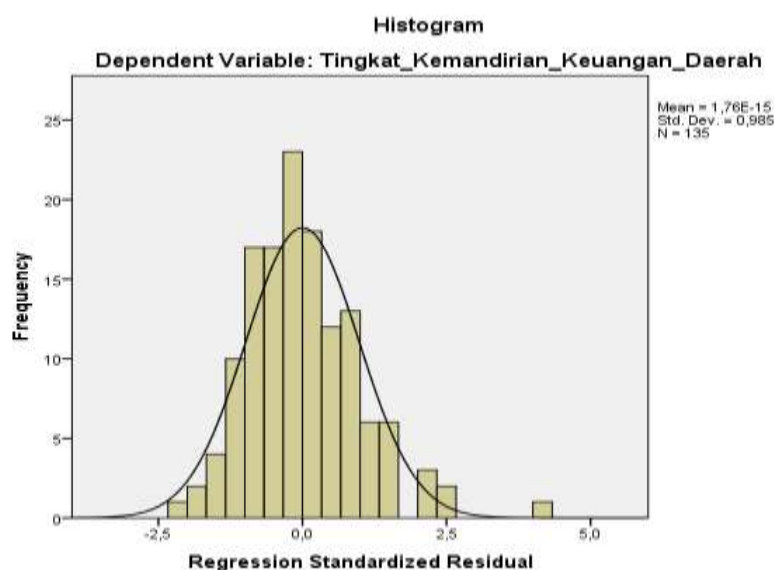
No	Nama Kabupaten/Kota	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	Y	Sampel
10	Kabupaten Lamongan			X			X
11	Kabupaten Lumajang						√
12	Kabupaten Madiun						√
13	Kabupaten Magetan						√
14	Kabupaten Malang						√
15	Kabupaten Mojokerto						√
16	Kabupaten Nganjuk						√
17	Kabupaten Ngawi						√
18	Kabupaten Pacitan						√
19	Kabupaten Pamekasan						√
20	Kabupaten Pasuruan		X				X
21	Kabupaten Ponorogo						√
22	Kabupaten Probolinggo						√
23	Kabupaten Sampang		X				X
24	Kabupaten Sidoarjo	X	X			X	X
25	Kabupaten Situbondo						√
26	Kabupaten Sumenep						√
27	Kabupaten Trenggalek						√
28	Kabupaten Tuban						√
29	Kabupaten Tulungagung						√
30	Kota Batu						√
31	Kota Blitar						√
32	Kota Kediri						√
33	Kota Madiun		X				X
34	Kota Malang	X				X	X
35	Kota Mojokerto		X				X
36	Kota Pasuruan		X				X
37	Kota Probolinggo				X		X
38	Kota Surabaya	X	X	X		X	X
Jumlah sampel yang diteliti							27

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 17 dapat disimpulkan terdapat 11 (sebelas) kabupaten dan kota yang memiliki data ekstrim, yaitu Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Sehingga terdapat 27

(dua puluh tujuh) yang dapat dijadikan sampel penelitian yang akan dimasukkan dalam analisis data, baik analisis deskriptif maupun analisis inferensial.

3. Transformasi Data Pada Sampel Penelitian



Gambar 11. Grafik Histogram Pada 27 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 11 setelah dilakukan *trimming*, yaitu memangkas atau mengeluarkan data *outlier* pada sampel penelitian dan dilakukan uji normalitas dapat diketahui bahwa data pada sampel penelitian masih memiliki distribusi yang tidak normal. Hal ini dikarenakan dalam analisis grafik histogram masih terdapat data yang berada diluar pola kurva normal. Oleh karena untuk mengatasi hal tersebut dilakukan transformasi data melalui logaritma natural (\ln). Logaritma natural ini dilakukan melalui menu transform yang terdapat dalam *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 23. Berikut ini adalah hasil dari transformasi data pada setiap variabel pada penelitian.

a. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Pajak Daerah (\ln_{X_1})

Tabel 18. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Pajak Daerah (\ln_{X_1})

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Pajak Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	0,24	0,20	0,36	0,42	0,57
2	Kabupaten Banyuwangi	0,87	1,24	1,36	1,43	1,46
3	Kabupaten Blitar	0,31	0,31	0,91	0,96	0,99
4	Kabupaten Bojonegoro	0,37	1,06	1,00	1,00	0,97
5	Kabupaten Bondowoso	-0,06	-0,13	0,33	0,22	0,25
6	Kabupaten Jember	0,94	1,39	1,43	1,37	1,45
7	Kabupaten Jombang	0,80	0,86	1,25	1,32	1,40
8	Kabupaten Kediri	1,09	1,69	1,68	1,68	1,74
9	Kabupaten Lumajang	0,49	0,51	0,72	0,83	0,94
10	Kabupaten Madiun	0,31	0,31	0,70	0,81	0,79
11	Kabupaten Magetan	0,09	0,12	0,82	0,78	0,79
12	Kabupaten Malang	1,17	1,33	1,62	1,59	2,45
13	Kabupaten Mojokerto	2,09	2,09	2,28	2,38	2,45
14	Kabupaten Nganjuk	0,21	0,23	1,11	1,10	1,26
15	Kabupaten Ngawi	0,14	0,17	0,70	0,70	0,75
16	Kabupaten Pacitan	-0,19	-0,16	0,49	0,43	0,57
17	Kabupaten Pamekasan	0,10	0,00	0,26	0,32	0,39
18	Kabupaten Ponorogo	0,48	1,00	0,97	1,00	1,13
19	Kabupaten Probolinggo	0,30	0,39	0,69	0,78	0,81
20	Kabupaten Situbondo	0,36	0,44	0,58	0,55	0,64
21	Kabupaten Sumenep	-0,39	-0,34	-0,13	-0,19	-0,15
22	Kabupaten Trenggalek	-0,13	-0,09	0,43	0,45	0,51
23	Kabupaten Tuban	1,89	2,17	2,07	2,10	2,07
24	Kabupaten Tulungagung	0,49	0,52	0,99	0,97	0,96
25	Kota Batu	1,74	2,09	2,19	2,44	2,41
26	Kota Blitar	0,72	0,70	1,11	1,14	1,12
27	Kota Kediri	1,41	1,77	1,76	1,75	2,01

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018.

b. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Retribusi Daerah ($\ln X_2$)

Tabel 19. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Retribusi Daerah
($\ln X_2$)

No	Nama kabupaten/kota	Proporsi Retribusi Daerah(%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	0,66	0,66	0,21	-0,05	-0,19
2	Kabupaten Banyuwangi	0,39	0,40	1,02	0,12	0,21
3	Kabupaten Blitar	0,24	0,25	0,22	-0,01	-0,08
4	Kabupaten Bojonegoro	0,74	0,63	0,24	0,39	0,47
5	Kabupaten Bondowoso	0,62	0,45	-0,20	-0,03	-0,22
6	Kabupaten Jember	0,63	0,63	0,81	0,10	0,13
7	Kabupaten Jombang	0,57	0,72	0,54	0,62	0,62
8	Kabupaten Kediri	0,22	0,25	0,63	-0,08	0,20
9	Kabupaten Lumajang	0,68	0,52	0,89	0,35	0,37
10	Kabupaten Madiun	0,27	0,31	0,36	0,20	0,33
11	Kabupaten Magetan	0,53	0,63	0,23	0,26	0,10
12	Kabupaten Malang	0,66	0,58	0,53	0,15	0,17
13	Kabupaten Mojokerto	0,99	0,99	0,82	0,67	0,54
14	Kabupaten Nganjuk	0,17	0,22	0,17	0,18	0,11
15	Kabupaten Ngawi	-0,25	0,13	-0,06	-0,19	-0,24
16	Kabupaten Pacitan	0,39	0,55	0,48	0,36	0,52
17	Kabupaten Pamekasan	0,44	0,44	-0,13	-0,26	-0,31
18	Kabupaten Ponorogo	0,34	0,11	-0,27	-0,36	-0,76
19	Kabupaten Probolinggo	0,63	0,63	0,79	0,11	0,22
20	Kabupaten Situbondo	0,18	0,36	0,11	0,34	-0,14
21	Kabupaten Sumenep	0,34	0,44	-0,04	-0,14	0,20
22	Kabupaten Trenggalek	0,77	0,76	0,77	0,49	0,00
23	Kabupaten Tuban	0,27	0,23	0,71	0,10	0,00
24	Kabupaten Tulungagung	0,00	0,08	0,25	-0,20	-0,13
25	Kota Batu	-0,01	-0,16	-0,45	-0,33	-0,31
26	Kota Blitar	0,24	0,27	0,17	0,13	0,13
27	Kota Kediri	0,09	-0,02	-0,34	-0,26	-0,16

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018.

c. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ($\ln X_3$)

Tabel 20. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ($\ln X_3$)

	Nama kabupaten/kota	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	-1,83	-2,30	-2,41	-2,21	-2,30
2	Kabupaten Banyuwangi	-0,15	-0,30	-0,45	-0,58	-0,62
3	Kabupaten Blitar	-2,66	-2,30	-2,30	-2,41	-2,53
4	Kabupaten Bojonegoro	-0,49	-0,31	-0,31	-0,62	-0,42
5	Kabupaten Bondowoso	-0,78	-1,31	-1,47	-1,61	-1,66
6	Kabupaten Jember	-0,34	-0,73	-1,17	-1,77	-1,77
7	Kabupaten Jombang	-1,83	-1,83	-2,04	-2,04	-2,21
8	Kabupaten Kediri	-1,31	-0,82	-0,92	-1,08	-1,14
9	Kabupaten Lumajang	-1,11	-1,51	-1,66	-1,77	-1,83
10	Kabupaten Madiun	-1,43	-0,99	-1,39	-1,35	-1,27
11	Kabupaten Magetan	-1,14	-1,24	-1,61	-1,90	-1,97
12	Kabupaten Malang	-0,76	-0,76	-0,89	-0,63	-0,87
13	Kabupaten Mojokerto	-1,35	-1,35	-1,56	-1,61	-1,56
14	Kabupaten Nganjuk	-1,20	-1,51	-1,71	-1,77	-1,77
15	Kabupaten Ngawi	-1,90	-0,49	-0,65	-0,76	-0,76
16	Kabupaten Pacitan	-1,11	-1,56	-1,66	-1,77	-1,83
17	Kabupaten Pamekasan	-1,56	-1,97	-2,12	-2,21	-2,30
18	Kabupaten Ponorogo	-2,30	-2,66	-2,81	-3,00	-3,00
19	Kabupaten Probolinggo	-0,45	-0,99	-1,14	-1,24	-1,27
20	Kabupaten Situbondo	-0,84	-0,94	-1,20	-1,27	-1,31
21	Kabupaten Sumenep	-0,11	-0,31	-0,33	-0,45	-0,30
22	Kabupaten Trenggalek	-1,56	-1,14	-1,31	-1,31	-1,31
23	Kabupaten Tuban	0,05	-0,48	-0,62	-0,63	-0,67
24	Kabupaten Tulungagung	-2,12	-1,83	-1,71	-1,77	-1,71
25	Kota Batu	-1,08	-0,99	-1,17	-1,20	-1,31
26	Kota Blitar	-1,71	-1,97	-2,04	-2,04	-2,12

Lanjutan tabel 20. hasil logaritma natural pada proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Ln_X3)

	Nama kabupaten/kota	Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan(%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
27	Kota Kediri	-1,90	-2,81	-2,66	-2,53	-2,04

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018.

d. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah (Ln_X4)

Tabel 21. Hasil Logaritma Natural Pada Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Ln_X4)

	Nama kabupaten/kota	Proporsi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	1,24	1,21	1,71	1,98	2,11
2	Kabupaten Banyuwangi	1,26	1,36	1,48	1,89	1,95
3	Kabupaten Blitar	1,44	1,50	1,79	1,88	1,84
4	Kabupaten Bojonegoro	1,48	1,64	1,92	1,93	1,86
5	Kabupaten Bondowoso	1,39	1,27	1,85	1,86	1,92
6	Kabupaten Jember	1,91	1,90	2,20	2,26	2,38
7	Kabupaten Jombang	1,98	1,98	2,36	2,42	2,36
8	Kabupaten Kediri	1,29	1,44	1,90	1,93	1,94
9	Kabupaten Lumajang	1,59	1,63	2,06	2,15	2,19
10	Kabupaten Madiun	1,32	1,37	1,62	1,70	1,67
11	Kabupaten Magetan	1,42	1,35	1,77	1,95	1,87
12	Kabupaten Malang	1,19	1,46	1,84	1,90	2,01
13	Kabupaten Mojokerto	1,28	1,28	1,89	1,89	1,96
14	Kabupaten Nganjuk	1,84	1,96	2,26	2,29	2,36
15	Kabupaten Ngawi	1,06	1,14	1,88	1,90	1,87
16	Kabupaten Pacitan	1,21	1,14	1,52	1,75	1,83
17	Kabupaten Pamekasan	1,63	1,53	2,19	2,06	2,01
18	Kabupaten Ponorogo	1,69	1,67	2,10	2,06	2,11

Lanjutan tabel 21. hasil logaritma natural pada proporsi lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah (\ln_{x_4})

	Nama kabupaten/kota	Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
19	Kabupaten Probolinggo	1,14	1,42	1,99	2,04	2,01
20	Kabupaten Situbondo	1,33	1,29	1,85	1,85	2,07
21	Kabupaten Sumenep	1,23	1,25	1,99	1,87	1,99
22	Kabupaten Trenggalek	1,22	1,13	1,59	1,88	2,11
23	Kabupaten Tuban	1,63	1,44	1,70	2,00	1,97
24	Kabupaten Tulungagung	2,03	1,94	2,19	2,25	2,27
25	Kota Batu	-0,22	0,36	0,45	0,59	0,46
26	Kota Blitar	2,11	2,13	2,33	2,43	2,42
27	Kota Kediri	2,16	2,06	2,39	2,44	2,47

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018.

e. Hasil Logaritma Natural Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (\ln_Y)

Tabel 22. Hasil Logaritma Natural Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (\ln_Y)

	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangkalan	2,05	2,05	2,29	2,70	2,69
2	Kabupaten Banyuwangi	2,23	2,64	2,66	3,15	2,99
3	Kabupaten Blitar	2,05	2,09	2,45	2,86	2,64
4	Kabupaten Bojonegoro	2,25	2,49	2,61	2,85	2,84
5	Kabupaten Bondowoso	2,12	2,18	2,62	2,72	2,61
6	Kabupaten Jember	2,63	2,72	2,94	3,18	3,14
7	Kabupaten Jombang	2,59	2,86	2,98	3,44	3,23
8	Kabupaten Kediri	2,19	2,56	3,13	3,15	3,02
9	Kabupaten Lumajang	2,29	2,26	2,68	2,99	2,93

Lanjutan tabel 22. hasil logaritma natural pada rasio kemandirian keuangan daerah (\ln_Y)

	Nama kabupaten/kota	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah(%)				
		2012	2013	2014	2015	2016
10	Kabupaten Madiun	1,99	2,052	2,30	2,69	2,54
11	Kabupaten Magetan	2,06	2,04	2,36	2,82	2,59
12	Kabupaten Malang	2,31	2,48	2,80	3,19	3,08
13	Kabupaten Mojokerto	2,89	2,89	3,23	3,65	3,53
14	Kabupaten Nganjuk	2,32	2,39	2,79	3,21	3,11
15	Kabupaten Ngawi	1,88	2,11	2,45	2,80	2,59
16	Kabupaten Pacitan	1,88	2,12	2,53	2,68	2,63
17	Kabupaten Pamekasan	2,22	2,11	2,63	2,78	2,62
18	Kabupaten Ponorogo	2,27	2,33	2,62	2,91	2,80
19	Kabupaten Probolinggo	2,07	2,16	2,64	2,91	2,82
20	Kabupaten Situbondo	2,19	2,04	2,42	2,72	2,70
21	Kabupaten Sumenep	1,97	2,11	2,42	2,58	2,62
22	Kabupaten Trenggalek	1,99	1,95	2,32	2,77	2,71
23	Kabupaten Tuban	2,81	2,87	2,97	3,41	3,23
24	Kabupaten Tulungagung	2,75	2,43	2,79	3,18	2,99
25	Kota Batu	2,15	2,49	2,56	3,03	2,86
26	Kota Blitar	2,59	2,60	2,84	3,22	3,05
27	Kota Kediri	2,83	3,03	3,05	3,36	3,34

Sumber : Data diolah Peneliti, 2018.

4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Tujuan dari analisis statistik deskriptif adalah memudahkan pembaca dalam membaca data serta memahami data dalam penelitian ini.

Berikut ini akan dijabarkan mengenai output *Statistical Package for the Sosial Sciences* (SPSS) dari analisis statistik deskriptif yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tabel dibawah ini.

Tabel 23. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Proporsi pajak daerah	135	0,68	11,60	3,1528	2,47763
Proporsi retribusi daerah	135	0,47	2,78	1,3704	,46911
Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	135	0,05	1,05	0,3043	0,3043
Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	135	0,80	11,79	6,2994	6,2994
Tingkat kemandirian keuangan daerah	135	6,53	38,45	15,1184	15,1184
Valid N (listwise)	135				

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan data tabel 23 diatas dapat dijelaskan bahwa:

- Variabel proporsi pajak daerah (X_1) memiliki nilai minimum sebesar 0,68%, nilai maksimum sebesar 11,60%, nilai rata-rata proporsi pajak daerah sebesar 3,1528%, dan standar deviasi sebesar 2,47763% dengan jumlah sampel (N) sebanyak 135.
- Variabel proporsi retribusi daerah (X_2) memiliki nilai minimum sebesar 0,47%, nilai maksimum sebesar 2,78%, nilai rata-rata proporsi retribusi daerah sebesar 1,3704%, dan standar deviasi sebesar 0,46911% dengan jumlah sampel (N) sebanyak 135.
- Variabel proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) memiliki nilai minimum sebesar 0,05%, nilai maksimum sebesar 1,05%, nilai rata-rata hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar

0,3043%, dan standar deviasi sebesar 0,20734% dengan jumlah sampel (N) sebanyak 135.

- d. Variabel proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) memiliki nilai minimum sebesar 0,80%, nilai maksimum sebesar 11,79%, nilai rata-rata proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 6,2994%, dan standar deviasi sebesar 2,38625% dengan jumlah sampel (N) sebanyak 135.
- e. Variabel tingkat kemandirian kemandirian daerah yang dihitung melalui rasio kemandirian keuangan daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 6,53%, nilai maksimum sebesar 38,45%, nilai rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 15,1184%, dan standar deviasi sebesar 6,20556% dengan jumlah sampel (N) sebanyak 135.

3. Hasil Analisis Statistik Inferensial

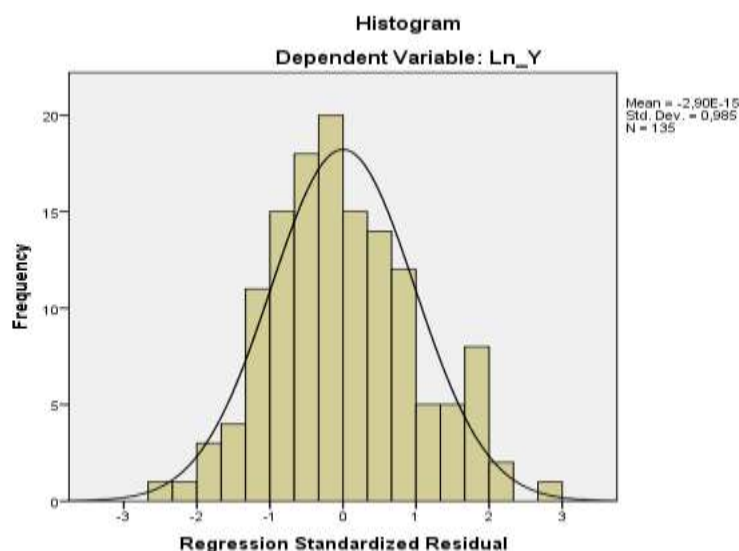
a. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Jika dalam asumsi ini dilanggar atau dikatakan memiliki distribusi tidak normal maka uji statistik menjadi tidak valid. Terdapat 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik.

a) Analisis grafik

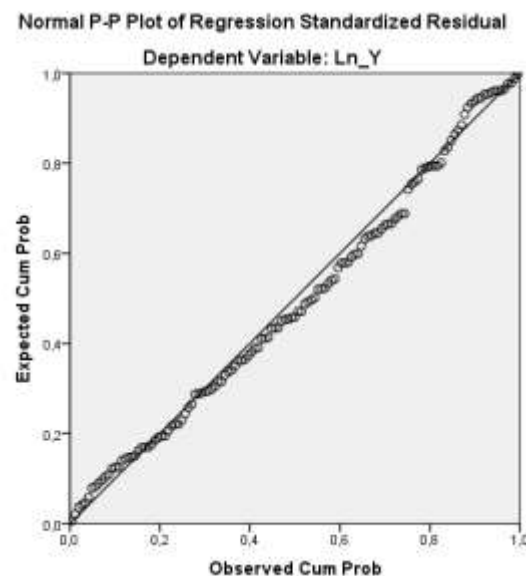
Pada analisis grafik terdapat dua cara untuk melihat normalitas residual, yaitu dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot. Grafik histogram dilakukan dengan cara membandingkan antara data observasi atau histogram dengan kurva normal. Grafik histogram dikatakan memiliki distribusi normal apabila sebaran data observasi (histogram) mengikuti pola kurva normal. Kemudian untuk normal probability Plot dikatakan berdistribusi normal apabila garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis grafik melalui gambar grafik histogram dan normal probability plot (P-P Plot).



Gambar 12. Grafik Histogram

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 12 diatas menunjukkan bahwa histogram sebagian besar tampak mengikuti pola kurva normal sehingga dapat dikatakan bahwa sebaran data tersebut berdistribusi normal.



Gambar 13. Normal Probability Plot

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan gambar 12 diatas dapat dijelaskan bahwa titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas atau dikatakan memiliki distribusi normal.

b) Analisis Statistik

Uji normalitas yang menggunakan analisis grafik dapat meyesatkan apabila tidak digunakan secara hat-hati. Hal ini dikarenakan pada grafik histogram maupun normal P-P plot secara visual atau gambarnya mungkin terlihat normal padahal secara statistik bisa dikatakan berdistribusi tidak normal. Oleh karena itu dalam uji normalitas ini digunakan pula analisis

statistik melalui statistik uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji normalitas menggunakan statistik uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > taraf signifikansi, yaitu 0,05. Berikut ini adalah tabel hasil uji K-S.

Tabel 24. Hasil Statistik Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13634130
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,046
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

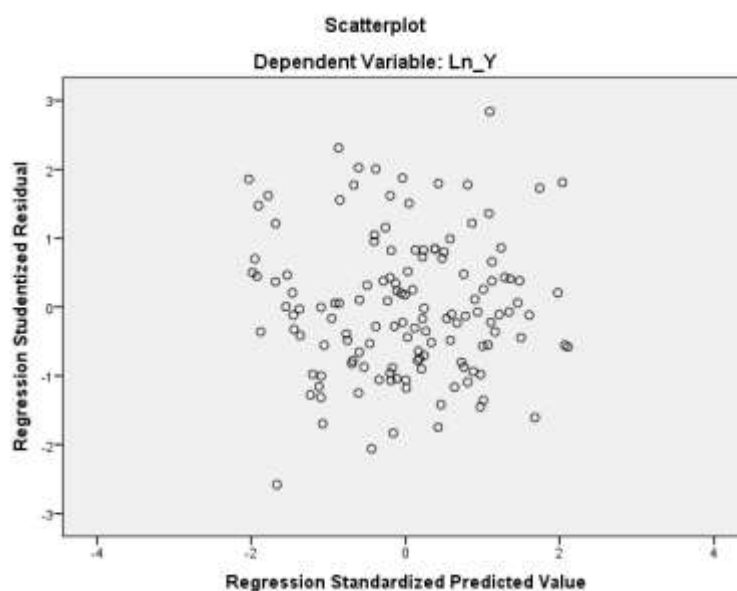
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 19 tentang statistik uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.200. Distribusi dikatakan normal apabila nilai signifikansi > 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal atau asumsi normalitas terpenuhi karena nilai signifikansi $0.200 > 0.05$.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Data yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Berikut ini adalah hasil pengujian dengan prosedur uji menggunakan uji *Scatterplot* (alur sebaran).



Gambar 14. Grafik *Scatterplot*
Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan uji scatterplot tersebut dapat dilihat bahwa pada gambar di atas, titik-titik menyebar secara acak, baik dibagian atas angka nol pada sumbu Y maupun di bawah angka nol dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diuji menggunakan *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas di antara variabel bebas. Berikut ini merupakan hasil pengujian multikolonieritas yang dijelaskan melalui tabel 18.

Tabel 25. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(constan)		
Proporsi pajak daerah	0,976	1,025
Proporsi retribusi daerah	0,941	1,063
Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,859	1,164
Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	0,858	1,166

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan data dari tabel 25 mengenai hasil uji multikolinieritas dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) nilainya lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF dari seluruh variabel

bebas kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas diantara keempat variabel bebas tersebut.

4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Pengujian Durbin-Watson dinyatakan tidak ada autokorelasi jika $du < d < 4-du$. Berikut ini merupakan tabel hasil uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Tabel 26. Hasil Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,941	0,885	0,882	0,13842	1,812

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson diatas dapat diketahui bahwa nilai d sebesar 1,812. Nilai du diperoleh dari tabel Durbin-Watson sebesar 1,78. Oleh karena itu dapat diperoleh hasil $1,7802 < 1,812 < 2,2198$. Hasil tersebut sesuai dengan kriteria $du < d < 4-du$. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 diterima yang menunjukkan tidak ada autokorelasi.

4. Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya nilai variabel terikat, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) berdasarkan nilai variabel bebas, yaitu proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) yang diketahui. Hasil analisis regresi linier berganda tersebut dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 27. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients (Koefisien Regresi)	Standardized Coefficients	t _{hitung}	Sig.
	B	Beta		
(Constant)	1,479		28,590	0,000
Proporsi Pajak Daerah (X_1)	0,390	0,662	21,990	0,000
Proporsi Retribusi Daerah (X_2)	-0,093	-0,192	-6,253	0,000
Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3)	0,044	0,075	2,351	0,020
Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X_4)	0,499	0,563	17,537	0,000

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terlihat pada tabel 27 pada kolom *unstandardized coefficients* bagian B, diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,479 + 0,390 X_1 - 0,093 X_2 + 0,044 X_3 + 0,499 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat kemandirian keuangan daerah

α = Konstanta

X_1 = Proporsi pajak daerah

X_2 = Proporsi retribusi daerah

X_3 = Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

X_4 = Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

e = Kesalahan pengganggu (error of term)

Adapun Interpretasi dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

a. $\alpha = 1,479$

Konstanta sebesar 1,479 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) maka tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) sebesar 1,479%.

b. $X_1 = 0,390$

Nilai koefisien regresi untuk variabel proporsi pajak daerah (X_1) sebesar 0,390 dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa proporsi pajak daerah mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan proporsi pajak daerah sebesar satu satuan akan disertai peningkatan variabel

tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,390% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap. Apabila terjadi penurunan proporsi pajak daerah sebesar satu satuan maka akan disertai penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,390% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

c. $X_2 = -0,093$

Nilai koefisien regresi untuk variabel proporsi retribusi daerah (X_2) sebesar -0,093 dan bertanda negatif. Koefisien ini menunjukkan bahwa proporsi retribusi daerah mempunyai hubungan berbanding terbalik dengan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan proporsi retribusi daerah sebesar satu satuan akan disertai penurunan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar -0,093% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap. Apabila terjadi penurunan proporsi retribusi daerah sebesar satu satuan maka akan disertai peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,093% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

d. $X_3 = 0,044$

Nilai koefisien regresi untuk variabel proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) sebesar 0,044 dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar satu

satuan akan disertai peningkatan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,044% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap. Apabila terjadi penurunan proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar satu satuan maka akan disertai penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,044% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

e. $X_4 = 0,499$

Nilai koefisien regresi untuk variabel proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) sebesar 0,499 dan bertanda positif. Koefisien ini menunjukkan bahwa proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mempunyai hubungan positif atau searah dengan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar satu satuan akan disertai peningkatan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,499% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap. Apabila terjadi penurunan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar satu satuan maka akan disertai penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,499% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap.

f. Standar error (e) menunjukkan tingkat kesalahan pengganggu.

5. Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) ini bertujuan untuk melihat atau mengukur mengenai berapa besar atau seberapa jauh kemampuan variabel bebas

secara bersama-sama dalam memberi penjelasan terhadap variabel terikat. Pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat diukur dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat adalah terbatas sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) yang mendekati satu berarti bahwa variabel-variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Berikut ini adalah tabel mengenai hasil uji koefisien determinasi (R^2).

Tabel 28. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,941	0,885	0,882	0,13842

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 28 di atas dapat dijelaskan bahwa angka R sebesar 0,941 menunjukkan bahwa besarnya korelasi atau hubungan variabel proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sangat kuat, yaitu sebesar 0,941. Angka tersebut dikatakan sangat kuat karena angka tersebut berada diatas 0,50 sedangkan untuk nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,882 atau 88,2%. Nilai ini mengindikasikan bahwa 88,2% variasi atau perubahan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kemudian sisanya sebesar 0,118 atau 11,8% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

6. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara membandingkan besaran nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berikut adalah hasil pengujian secara simultan atau uji statistik F yang disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 29. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	19,195	4	4,799	250,439	0,000
Residual	2,491	130	0,019		
Total	21,685	134			

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Dari hasil uji F pada penelitian ini, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 250,439 sedangkan F_{tabel} ($\alpha = 0.05$; df regresi = 4) adalah sebesar 2,44 dengan angka signifikansi sebesar 0.000. Oleh karena itu, karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $250,439 > 2,44$ dan angka signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti dapat disimpulkan bahwa

variabel bebas yaitu proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (Y) yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

b. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara signifikan. Pengujian parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berikut ini adalah hasil uji parsial atau uji statistik t.

Tabel 30. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	t_{hitung}	Sig.
1 (constant)	28,590	0,000
Proporsi pajak daerah	21,990	0,000
Proporsi retribusi daerah	-6,253	0,000
Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,351	0,020
Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	17,537	0,000

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 30 diatas menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap

tingkat kemandirian keuangan daerah, yaitu variabel proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4). Berikut ini adalah interpretasi hasil uji t pada setiap variabel bebas, yaitu sebagai berikut:

1) Variabel Proporsi Pajak Daerah (X_1)

Besarnya t_{hitung} variabel proporsi pajak daerah (X_1) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 21,990. Hal ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($21,990 > 1,978$). Nilai signifikansinya $0.000 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi pajak daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y).

2) Variabel Proporsi Retribusi Daerah (X_2)

Besarnya t_{hitung} variabel proporsi retribusi daerah X_2 terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar -6,253. Artinya $t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-6,253 < -1,978$). Nilai signifikansinya $0.000 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi retribusi daerah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y).

3) Variabel Proporsi Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X_3)

Besarnya t_{hitung} variabel proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 2,351. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,351 > 1,978$). Nilai signifikansinya $0.020 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y).

4) Variabel Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (X_4)

Besarnya t_{hitung} variabel proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 17,537. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($17,537 > 1,978$). Nilai signifikansinya $0.000 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y).

D. Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini merupakan hasil dari penelitian dan pengujian yang telah dilakukan serta gabungan penelitian-penelitian terdahulu yang mempelajari pengaruh variabel bebas yang dipilih peneliti terhadap variabel terikat. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tabel 31. Keputusan Hipotesis

No	Hipotesis	Keputusan Hipotesis
1.	H ₁ : Proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.	Diterima
2.	H ₂ : Proporsi pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.	Diterima
3.	H ₃ : Proporsi retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.	Diterima
4.	H ₄ : Proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.	Diterima
5.	H ₅ : Proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.	Diterima

Sumber: Data diolah Peneliti, 2018.

1. Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016 Secara Simultan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan daerah utama yang diperhitungkan adalah Pendapatan Asli daerah (PAD). Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber keuangan utama suatu daerah yang berasal dari daerah tersebut sendiri. Pendapatan Asli daerah (PAD) dapat dimaksimalkan penerimaannya apabila daerah tersebut mampu menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah berdasarkan segala potensi maupun sumber daya yang berada di daerah tersebut. Pada dasarnya suatu daerah dapat dianggap memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dibedakan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Oleh karena itu dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan sangat mempengaruhi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016. Apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan

pinjaman maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dari segi keuangan daerahnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi atau tidak tergantung dengan pengalokasian dana perimbangan yang berasal dari pusat/provinsi. Demikian sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti maka daerah tersebut dapat dikatakan belum mandiri dari segi keuangan daerahnya karena daerah tersebut masih tergantung dengan pengalokasian dana perimbangan yang berasal dari pusat/provinsi.

Hal ini dapat didukung serta dibuktikan dengan hasil analisis pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016 ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan uji F dimana nilai signifikansi harus lebih kecil dari taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$ atau 5%). Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Megariski (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Megariski (2016) berpendapat bahwa Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Demikian sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut dikatakan masih bergantung pada pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat.

2. Pengaruh Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Secara Parsial Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

a. Pengaruh Proporsi Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungannya

terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi. Kemudian dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan tersebut maka suatu daerah dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui peningkatan pajak daerah. Pajak daerah sebagai pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum daerah yakni pelaksanaan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah yang lebih baik. Semakin besar penerimaan pajak daerah maka akan semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pula pada berkurangnya tingkat ketergantungan terhadap pengalokasian dana pemerintah pusat/provinsi. Demikian sebaliknya semakin kecil penerimaan pajak daerah maka akan semakin menurun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada ketergantungan terhadap pengalokasian dana pemerintah pusat/provinsi yang semakin besar.

Hal ini dapat didukung serta dibuktikan dengan hasil analisis pengolahan data yang dilakukan bahwa besarnya t_{hitung} variabel proporsi pajak daerah (X_1) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 21,990. Hal ini berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($21,990 > 1,977$). Nilai signifikansinya $0.000 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi pajak daerah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nggilu *et al.*, (2016) yang menyatakan bahwa variabel pajak daerah (X_1) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah (Y).

b. Pengaruh Proporsi Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel proporsi retribusi daerah X_2 terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar -6,253. Artinya $t_{hitung} < -t_{tabel}$ ($-6,253 < -1,977$). Nilai signifikansinya $0.000 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi retribusi daerah (X_2) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016. Variabel retribusi daerah memiliki nilai negatif, yaitu sebesar -6,253 berarti terdapat hubungan tidak searah. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan proporsi retribusi daerah sebesar 1% akan disertai penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar -6,253% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain

tetap. Apabila terjadi penurunan sebesar 1% pada proporsi retribusi daerah akan disertai peningkatan tingkat kemandirian daerah sebesar 6,253% dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2017) yang menyatakan bahwa bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Nabila (2017) berpendapat jika retribusi daerah bertambah atau meningkat maka akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 2,502%.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan Orang Pribadi (OP) atau badan. Berbeda dengan pajak daerah, semakin besar penerimaan retribusi daerah maka akan semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah. Demikian sebaliknya semakin kecil penerimaan retribusi daerah maka akan semakin menurun penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak pada peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat demikian dikarenakan penerimaan retribusi daerah

mengalami penurunan di setiap tahunnya di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penurunan ini disebabkan karena pemerintah daerah mempunyai pertimbangan lain untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pada penerimaan pajak daerah. Salah satu contohnya adalah di Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerah Kabupaten Lamongan tidak mengenakan retribusi izin mendirikan bangunan usaha perhotelan. Hal ini dilakukan dalam upaya agar para pengusaha (investor) semakin banyak yang membuat usaha dibidang perhotelan di kabupaten tersebut sehingga pemerintah daerah akan menerima pajak hotel di setiap tahunnya.

c. Pengaruh Proporsi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 2,351. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,351 > 1,977$). Nilai signifikansinya $0.020 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial

terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi. Dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan tersebut maka suatu daerah dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Djaenuri (2014:99) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil keuntungan bersih perusahaan milik daerah dan badan-badan usaha milik daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau besar penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka akan semakin meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berdampak terhadap peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Begitu juga sebaliknya semakin rendah penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka semakin rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berdampak terhadap menurunnya tingkat

kemandirian keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi.

d. Pengaruh Proporsi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2016

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa besarnya t_{hitung} variabel proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 17,537. Artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($17,537 > 1,977$). Nilai signifikansinya $0.000 \leq 0.05$. Berarti hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2016. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulatsih (2015) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar suatu daerah dapat mengurangi tingkat ketergantungannya

terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat/provinsi. Dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan tersebut maka suatu daerah dapat memaksimalkannya melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya melalui penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi atau besar penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka akan semakin meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berdampak terhadap peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang rendah terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Begitu juga sebaliknya semakin rendah penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah maka semakin rendah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan berdampak terhadap menurunnya tingkat kemandirian keuangan daerah yang berarti daerah tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dilakukan untuk mengetahui variabel bebas apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Variabel bebas yang digunakan adalah proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4). Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan *Statistical Package for the Sosial Sciences* (SPSS) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016. Hal ini dapat diketahui dari hasil uji simultan (uji F) yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$ atau 5%). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara proporsi pajak daerah (X_1), proporsi retribusi daerah (X_2), proporsi hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3), dan proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) secara simultan.

2. Variabel proporsi pajak daerah (X_1) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
3. Variabel proporsi retribusi daerah (X_2) memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016
4. Variabel proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.
5. Variabel proporsi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

B. Saran

1. Bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur
 - a. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah agar dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pengalokasian dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Sehingga pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan mandiri secara keuangan daerahnya yang merupakan tujuan utama adanya otonomi daerah.

- b. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dari sumber-sumber potensial yang ada dan menggali secara optimal sumber-sumber potensial lain yang belum terjangkau oleh pemerintah daerah.
- c. Pengoptimalan potensi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Kemudian ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara penciptaan daya tarik bagi investor dan memberikan kemudahan bagi investor.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menambahkan variabel-variabel lain yang terkait dengan tingkat kemandirian keuangan daerah.

- b. Penelitian dapat menjadi acuan sebagai referensi juga dengan mengambil sampel di luar atau selain kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dan rentang waktu yang berbeda. Hal ini dikarenakan variabel proporsi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mampu menjelaskan sebanyak 88,2% variasi atau perubahan dalam tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan sisanya sebesar 11,8% dijelaskan oleh variasi atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku:

- Agung, Putu, Agung, Anak. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Djaenuri, Aries. 2014. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Nury dan Setiawan, Maman. 2014. *Ekonometrika : Pendekatan Teori dan Terapan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Daerah Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, Imam dan Nugroho, Trilaksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Handika, Ranga. 2015. *Ekonometrika keuangan menggunakan software R*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mahsun, Mohammad 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan : Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia : Edisi revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sholeh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata kelola Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Siahaan, Pahala, Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak : Edisi 4*. Jakarta: Salemba 4.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Referensi dari Jurnal :

- Alfarisi, Salman. 2015. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat)*. Jurnal Akuntansi Vol 3, No. 1.
- Bisma, I Dewa Gde dan Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Jurnal Ganeg Swara Vol 4, No. 3.
- Nabila, Salma, Riski. 2017. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2011-2014)*. Malang: Jurnal Perpajakan.
- Nggilu, Fadly, Harijanto Sabijono, dan Victorina Tirayoh. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah kabupaten.kota di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 16, No. 4.
- Novalistia, Lutfita, Rizka. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Jurnal Akuntansi Vol 2, No. 2.
- Megariski, Pradipta, Hestu. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada kabupaten/kota di Jawa Timur Periode 2010-2014)*. Malang: Jurnal Ekonomi.
- Mulatsih, Sri, Endang. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2008-2012*. Palembang: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 5, No.3.
- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, Maulida. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12, No.1: 88-99.

Referensi dari Undang-Undang :

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Referensi dari Internet :

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2017. *Industri Besar*. www.bps-jatim.go.id. (Diakses pada 22 Januari pukul 10.17 WIB).

Data Boks. 2017. *Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2015*. www.databoks.katadata.co.id. (Diakses pada 15 Februari pukul 17.20 WIB).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2017. *Kabupaten/Kota*. www.jatimprov.go.id. (Diakses pada 08 Februari pukul 12.25 WIB).